

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KINERJA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMANTASIKAN
PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DI KABUPATEN SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

B A N A N

NIM. 018556453

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam mengimplementasikan Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang. Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan, maka saya bersedia menerima saksi akademik.

Pontianak,2016

Yang menyatakan



Banan

Nim: 018556453

ABSTRAK

**KINERJA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM KESEHATAN SEKOLAH
DI KABUPATEN SINTANG**

Banan
Universitas Terbuka
banan.sintang@gmail.com

Kata Kunci: Analisis Kinerja dan Implementasi Program.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kinerja Tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja. Adapun dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator yaitu : Efektivitas, Responsibilitas, dan Produktivitas.

Indikator efektivitas secara khusus menganalisis tentang sejauh mana efektifnya kinerja tim pembina Usaha kesehatan sekolah di dalam menjalankan programnya. Indikator responsibilitas menjelaskan bagaimana daya tanggap atau kepekaan dari tim pembina usaha kesehatan sekolah terhadap tanggung jawabnya, dan yang terakhir adalah indikator produktivitas yaitu menganalisis seberapa jauh dan seberapa banyak hasil serta dampak dari tim pembina Usaha kesehatan sekolah selama menjalankan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif kualitatif, dengan objek penelitian dikhususkan kepada Sekretariat Usaha kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang,

Hasil akhir dari analisis terhadap Kinerja Tim pembina usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang yang telah di analisis menggunakan tiga indikator yaitu Efektivitas, Responsibilitas dan Produktivitas menunjukkan bahwa tugas serta fungsi dari Tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang belum lah dijalankan secara maksimal.

ABSTRACT

THE PERFORMANCE OF SUPERVISORS TEAM IN SCHOOL HEALTH PROGRAM
IN THE SINTANG DISTRICT

Banan
Open University of Indonesia
banan.sintang@gmail.com

The research was conducted to investigate the Performance of Supervisors Team in School Health Program in the Sintang district and what factors that influence the performance of Supervisors Team in School Healthy Program in the Sintang district. The study uses three indicators, namely effectivity, responsibility, and productivity.

Effectivity indicator is used to analyze how effective the performance of Supervisor team in Healthy School Program in the Sintang district. *Responsibility* indicator is used to analyze the responses or sensitively of performance of Supervisor team in Healthy School Program in the Sintang Regency. And the last one *Produktiviti* indicator is also used to describe the influence and impact or ending result as a result of running the program.

This study uses Qualitative descriptive approach. Sintang district secretary office healthy school programs as subject of this research. The result analyze performance supervisor team of healthy school program in Sintang district has used three indicators that effectivity, responsibility, and productivity. To show that responsibility and function of supervisors team healthy school program in sintang district has not been optimal.

Key Word: Performance Analyses, programs Implementation

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam mengimplementasikan Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang.

Penyusun TAPM : BANAN
NIM : 018556453
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

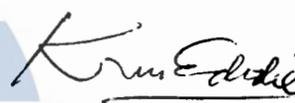
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Bakran Suni
 Nip. 19591212199021001

Pembimbing II



Dr. Karnedi, M.A.
 Nip. 196405081999031002

Mengetahui:

**Ketua Bidang Ilmu Sosial dan ilmu politik,
 Program Magister Administrasi Publik**



Dr. Darmanto, M.Ed
 Nip. 195910271986031003

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc, Ph.D
 Nip. 19520213 198503 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN**

- 1. Judul Penelitian** : Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Usaha Kesehatan Sekolah Di Kabupaten Sintang
- 2. Identitas Peneliti:**
 Nama : Banan
 Nim : 081556453
 UPBJJ : Pontianak
 Alamat : Jl. Sintang – Pontianak Km.13
 Telp/hp : 081257943828
 E-mail : banan.sintang@gmail.com
- 3. Pembimbing I**
 Nama : Dr. Bakran Suni
 NIP : 19591212199021001
 Pangkat/Gol : Pembina TK I/IV b
 Alamat Kantor : Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura Pontianak Jl. Imam Bonjol, telp. (0561) 571752 571753
 Telpon : 08125753548
 E-mail : suni.bakran@mail.com

Pontianak,

2016

Mengetahui,
 Ketua Bidang Ilmu /Program Magister
 Administrasi Publik

Peneliti,



Dr. Darmanto, M.Ed
 Nip.195910271986031003



Banan
 Nim: 018556453

Mengetahui,
 Direktur Program Sarjana

Pembimbing I



Suciati, M.Sc, Ph, D
 Nip. 19520213 198503 2001

Dr. Bakran Suni
 Nip. 19591212199021001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

Nama : BANAN
NIM : 018556453
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
**Judul TAPM : KINERJA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM USAHA
KESEHATAN SEKOLAH DI KABUPATEN SINTANG**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Usaha Kesehatan Sekolah Di Kabupaten Sintang, Program PascaSarjana Universitas Terbuka Pada:

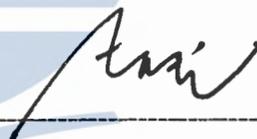
Hari/ Tanggal : Sabtu, 6 Pebruari 2016
 Waktu : 20.00- 21.30

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji:
Dr. Tati Rajati, M.M
NIP. 195908241986022001



Penguji Ahli
Pheni Chalid, SF.,MA.,Ph.D
NIP. 195605052000121001



Pembimbing I
Dr. Bakran Suni
NIP. 19591212199021001



Pembimbing II
Dr. Karnedi, M.A
Nip. 196405081999031002



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus yang telah memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “ **Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang**”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata 2 di bidang Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Disamping itu juga dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang”. di masa yang akan datang.

Penulis menemui banyak kesulitan dalam menyelesaikan penulisan ini, akan tetapi berkat usaha kerja keras dan ketabahan maka penulisan ini dapat diselesaikan. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral serta masukan dari kedua dosen pembimbing yang sangat berperan. Untuk itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak

Dr. Bakran Suni selaku pembimbing utama dan **Dr. Karnedi, MA**, selaku pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati yang tulus

dalam memberikan bimbingan juga masukan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, P.hd.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc., P.hd
3. Ketua Bidang Ilmu /Program Magister Administrasi Publik Dr. Darmanto, M.Ed
4. Kepala UPBJJ-UT Pontianak Dr. Tati Rajati, M.M
5. Bapak/Ibu Dosen atau Staf Pengajar Universitas Terbuka atas arahan dan bimbingannya dalam berbagai materi perkuliahan yang diberikan kepada kami selama ini.
6. Istri tercinta Mirawati yang selalu setia menemani, memotivasi, serta mencurahkan segala kemampuannya dengan penuh cinta kasih kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini,
7. Anakku terkasih James Bara Banan dan Gissella Natalie Banan, yang merupakan sumber inspirasi dan semangat dalam berkerja, belajar, sehingga tesis ini dapat di selesaikan dengan baik.
8. Seluruh Keluarga besar yang telah memberikan dukungan, baik secara moril, dana maupun doa selama penulis menempuh pendidikan Pascasarjana di Universitas Terbuka.
9. Rekan-rekan sesama mahasiswa MAP-Universitas Terbuka Angkatan yang telah memberikan dorongan dan semangat serta nilai persahabatan selama perkuliahan berlangsung.

Akhirnya Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan doa dan biaya sampai terselesainya tesis ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat yang penuh dengan kelimpahan.

Jakarta, 2016

Penulis,

BANAN

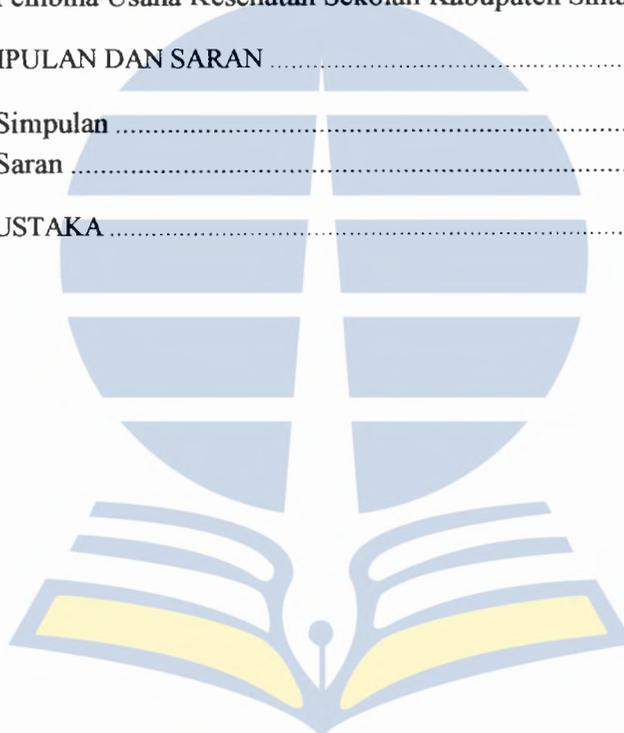


DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Definisi Kinerja.....	11
2. Aspek-aspek penilaian dalam Kinerja	14
3. Kebijakan Publik.....	16
4. Gambaran Umum Implementasi Usaha Kesehatan Sekolah ...	22
5. Fungsi Koordinasi	38
6. Kajian terhadap Penelitian terdahulu	42
7. Alur Pikir	49
8. Definisi Operasional	49
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	51
B. Fokus Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Instrumen Penelitian	52
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisa Data.....	56

BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang.....	57
B. Kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang	60
C. Indikator Kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang.....	63
1. Efektivitas	64
2. Responsibilitas	68
3. Produktivitas	72
D. Faktor yang mempengaruhi Kinerja UKS Kabupaten Sintang.....	75
1. Faktor Pendukung	75
2. Faktor Penghambat	77
E. Keterkaitan antara Variabel Tidak Profesional, Ketidakseriusan Anggota tim, Ketidakjelasan pembagian tugas, lemahnya koordinasi dan Finansial terhadap rendahnya Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang	88
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	93
A. Simpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96



DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	49
2. Tabel 4.1 Bagan Organisasi Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang.....	58
3. Tabel 4.2 Data Pembinaan UKS Kabupaten Sintang Tahun 2013.....	67
4. Tabel 4.4 Data Usulan dari Sekolah-sekolah.....	70
5. Tabel 4.5 Absensi Kehadiran Rapat UKS Tahun 2013.....	71
6. Tabel 4.6 Produktivitas UKS.....	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu elemen penting di dalam kehidupan manusia, terlebih bagi keberlangsungan pembangunan Nasional, oleh karena itu Pemerintah selalu mencari metode yang tepat guna menemukan formula baru di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan (UU N0.23 Th. 1992) tentang penyelenggaraan Kesehatan Sekolah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, meningkatkan lingkungan sehat dan mendidik sumber daya manusia. Dan juga sesuai dengan KEPMENKES N0.1426/2006 tentang upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan di sekolah guna meningkatkan kualitas kesehatan sekolah demi terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih dan nyaman, serta terbebas dari ancaman penyakit.

Program Usaha Kesehatan Sekolah dilaksanakan mulai dari TK sampai SLTA/MA, serta dilaksanakan secara berjenjang dari sekolah/madrasah sampai pusat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi baik antara sekolah dengan Tim Pembina, Tim Pembina UKS di bawahnya dengan yang di atasnya maupun antar sesama Tim Pembina UKS yang sejajar. Kegiatan UKS di lingkungan sekolah meliputi beberapa kegiatan.

Pertama: adalah rapat koordinasi baik di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten serta Tim Pembina, Semua dilakukan dengan mengundang para anggota Tim Pembina UKS baik dari bidang kesehatan dalam Negeri maupun dari Pendidikan Nasional.

Kedua: memberikan bantuan peningkatan kualitas kesehatan madrasah, kemudian orientasi dokter kecil untuk MI, dan kader kesehatan remaja untuk MTs dan MA. Pembinaan UKS oleh TP UKS (Tim Pembina UKS) masih rendah dan belum merata. Pendidikan kesehatan berbasis kesehatan dengan program usaha kesehatan sekolah, diharapkan menjadi bagian dari pelaksanaan pendidikan, bukan hanya di madrasah tetapi juga di sekolah.

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu unsur yang di bentuk untuk mengajarkan pola hidup sehat kepada anak-anak secara khusus di Sekolah-sekolah. Untuk melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan UKS secara terpadu dan terkoordinasi perlu disusun organisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) secara berjenjang sebagai berikut:

1. Tim Pembina UKS Pusat dibentuk di tingkat Pusat ditetapkan oleh Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri (SKB 4 menteri);
2. Tim Pembina UKS Provinsi, dibentuk di tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
3. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota, dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
4. Tim Pembina UKS Kecamatan, dibentuk di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Pelayanan kesehatan Sekolah masih menjadi permasalahan serius yang perlu di cari jalan keluarnya. Seperti yang disampaikan dalam buku Direktorat Jendral Pendidikan dasar (2012:75) :

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang ditujukan kepada peserta didik merupakan salah satu mata rantai yang penting dalam meningkatkan kualitas fisik penduduk. Dari berbagai hasil evaluasi dan

pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat disimpulkan berbagai kondisi sebagai berikut.

1. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, ditinjau dari segi sarana/prasarana, pengetahuan, sikap peserta didik di bidang kesehatan, warung sekolah, makanan sehari-hari/gizi, kesehatan gigi, kesehatan pribadi dan sebagainya secara umum memperlihatkan bahwa prinsip hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik belum mencapai tingkat yang diharapkan.
2. Sasaran upaya kesehatan ditinjau dari cakupan (coverage) sekolah, peserta didik dikaitkan dengan wajib belajar, mutu penyelenggaraan, ketenagaan dan sarana prasarana belum seimbang dengan usaha pencapaian tujuan UKS.
3. Perilaku hidup bersih dan sehat belum mencapai tingkat yang diharapkan, di samping itu ancaman penyakit terhadap peserta didik masih tinggi dengan adanya penyakit endemis dan kekurangan gizi.
4. Masalah kesehatan yang menimpa peserta didik meliputi:
 - a. Sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan
 - Jamban
 - Air bersih
 - b. Meningkatnya pecandu narkoba.
 - c. Meningkatnya HIV/AIDS melalui hubungan seksual.
 - d. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti : diare, cacangan, gigi berlubang dan lain-lain.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
6. Terbatasnya sarana dan prasarana UKS, perlu:
 - a. Pengadaan UKS kit, ruang UKS
 - b. Pengadaan media seperti poster, leaflet, lembar balik, dan lain-lain
 - c. Pengadaan buku pencatatan dan pelaporan
7. Pencatatan dan pelaporan yang masih/kurang terpenuhi:
 - a. Perlu diaktifkan
 - b. Setiap TP UKS memiliki catatan kegiatan
8. Kurangnya koordinasi dan komitmen dalam pelaksanaan program UKS.

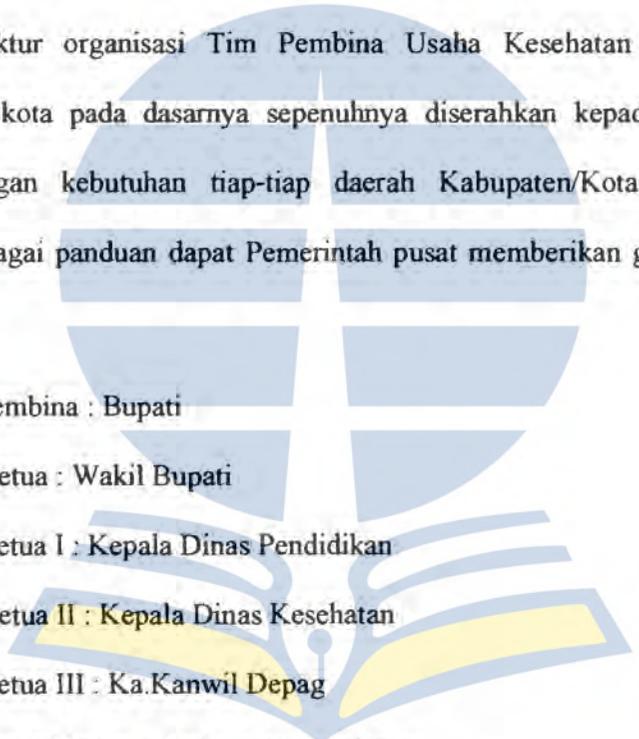
Mengingat hal tersebut di atas, pembinaan dan pengembangan UKS merupakan program yang mendesak untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan derajat kesehatan.

Salah satu program Pemerintah Kabupaten Sintang yang sedang dan terus dikembangkan adalah “BUDAYA HIDUP SEHAT” Hal ini merupakan salah satu

himbauan Bupati Sintang kepada seluruh lapisan masyarakat supaya melaksanakan *5 Budaya* dan salah satunya adalah “POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT” khususnya di sekolah-sekolah supaya di tanamkan sejak dini kepada para anak didik.

Kawasan Kabupaten Sintang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang turut ambil bagian dalam pembinaan kesehatan terhadap sekolah-sekolah. secara umum mekanisme kerjanya sudah di atur sedemikian rupa, sehingga memiliki kekhasan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Struktur organisasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Kabupaten kota pada dasarnya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Namun sebagai panduan dapat Pemerintah pusat memberikan gambaran sebagai berikut:

- 
- a. Pembina : Bupati
 - b. Ketua : Wakil Bupati
 - c. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan
 - d. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Ketua III : Ka.Kanwil Depag
 - f. Ketua Harian : Assisten yang relevan
 - g. Sekretaris : Kepala Biro yang menangani Pendidikan dan Kesehatan
 - h. Anggota :
 - 1) Unsur Dinas Pendidikan
 - 2) Unsur Dinas Kesehatan
 - 3) Unsur Kanwil Depag
 - 4) Unsur dinas/instansi yang dianggap relevan

Mengacu kepada struktur UKS yang ada tingkat Kabupaten kota di atas maka dapat dilihat bahwa Bupati sebagai Pembina, sementara dinas dan instansi lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi UKS. Oleh karena itu nyata bahwa tim pembina UKS adalah gabungan dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten Kota.

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 441/14/KEP-KESRA/2013, memiliki tugas sebagai pelaksana dan penyelenggara Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang.

Di dalam menjalankan tugasnya sebagai tim pembina UKS tingkat Kabupaten Kota, tim pembina UKS Kabupaten Sintang memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam melakukan pembinaan kesekolah-sekolah mulai dari TK sampai SMA secara khusus yang ada di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang terdiri dari 14 Kecamatan dan memiliki jumlah sekolah yang cukup banyak baik itu Swasta maupun negeri mulai dari TK sampai dengan SMA berjumlah sekitar 610 sekolah yang tersebar di 14 Kecamatan. Dalam kaitannya dengan penerapan program Usaha Kesehatan Sekolah, Pada prinsipnya setiap sekolah memiliki peluang yang sama di dalam mendapatkan pembinaan, tetapi kenyataan dilapangan hak untuk memperoleh pembinaan dan kunjungan dari tim pembina UKS tidak didapatkan oleh setiap sekolah terutama bagi sekolah yang terletak di Kecamatan yang sangat jauh secara geografis dan sulit dijangkau, sehingga pembinaan dan kunjungan dari tim pembina UKS hanya pada sekolah-sekolah yang dekat dengan Kabupaten kota. Salah satu masalah yang sangat nyata adalah malasnya Tim pembina UKS

Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan atau kunjungan. Bahkan didalam mengikuti rapat atau membicarakan segala hal yang berkaitan dengan program UKS, sangat minim sekali kehadiran dari anggota Tim pembina UKS.

Kondisi tersebut di perparah minimnya anggaran yang tersedia di dalam membiayai pembinaan dan kunjungan tim pembina UKS, Pada tahun 2013 anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang hanya sebesar Rp. 131.858.000, jumlah tersebut tidak lah berimbang dengan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sintang yang tersebar di 14 Kecamatan. Terlebih letak sekolah yang jauh secara geografis dan susah dijangkau akan memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga hal ini menyebabkan pembinaan dari Tim UKS Kabupaten Sintang menjadi sangat tidak maksimal dan seperti tebang pilih di dalam melakukan pembinaan kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sintang.

Salah satu program tim pembina UKS Kabupaten Sintang adalah mengikuti Lomba sekolah Sehat tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, oleh karena itu tugas awal dari Tim pembina UKS adalah melakukan penjarangan terhadap sekolah-sekolah yang selanjutnya menentukan sekolah mana yang layak mengikuti lomba. Tahun 2013 tim pembina UKS Kabupaten Sintang mendapat 4 sekolah yang berhasil dan layak mengikuti lomba yang selanjutnya pemenang di tingkat Kabupaten Kota akan mengikuti lomba tingkat Provinsi dan Nasional.

Adapun nama-nama sekolah yang dilakukan pembinaan Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati No: 441/552/KEP/DINKES/2013 :

1. TK Suluh Harapan Sintang
2. SD 1 Sintang
3. SMPN 1 Pandan
4. SMA 2 Sintang

Keempat sekolah di atas terpilih sebagai sekolah yang mendapat pembinaan tahun 2013 karena keempat sekolah tersebut memenuhi syarat dan terpilih sebagai pemenang ketika mengikuti lomba sekolah sehat (LSS) tingkat Kabupaten, dan selanjutnya memperoleh kesempatan untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi. Walaupun Lomba Sekolah sehat diselenggarakan setiap tahun, tetapi dilihat dari produktivitasnya belumlah memuaskan, baik dari mulai penjangkaran sekolah, sistem pembinaan sampai pada hasil dari lomba sekolah sehat.

Di dalam tim pembina UKS terdiri dari banyak unsur yang tergabung di dalamnya. Bupati menjadi pembina dan bagian Kesra sebagai *leading sektor* dan berkerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti: Lingkungan hidup Kabupaten Sintang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Palang Merah Indonesia Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.

Mengingat di dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah terdiri dari banyak Instansi terkait, maka hal ini akan mengakibatkan banyak permasalahan di dalam melakukan implementasi program-program UKS, di antaranya

adalah lemahnya koordinasi di dalam Tim pembina UKS hal ini dapat dilihat dari kurangnya kerjasama di dalam melakukan pembinaan kelapangan dari instansi yang tergabung di dalam tim pembina UKS, malasnya anggota tim pembina UKS mengikuti rapat atau pertemuan yang berhubungan dengan UKS, hal ini dibuktikan minimnya kehadiran dari anggota tim dalam setiap rapat. kurang kompaknya kerja Tim di dalam melakukan pembinaan, kurangnya motivasi pembinaan kedaerah-daerah hal ini dapat dilihat dari jadwal kunjungan kesekolah-sekolah yang belum terjadwal dengan baik serta perbedaan karakter individu yang merupakan unsur di dalam tim menjadi permasalahan serius yang perlu di temukan jalan keluarnya.

Berbagai permasalahan yang ada di atas menjadi sumber belum optimalnya kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang, atas dasar inilah penulis terdorong untuk mengambil penelitian yang berjudul: “ Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dalam Mengimplementasikan Program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang”

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari adanya persoalan dalam kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang yang belum maksimal dalam melakukan pembinaan UKS dan mensosialisasikan pola hidup sehat mendorong penulis untuk meneliti tentang sampai sejauh mana kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang yang ditinjau dari Efektivitas, Resposibilitas dan Produktivitas

2. Apa yang menyebabkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang belum bekerja secara optimal.

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pembinaan UKS di sekolah-sekolah
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Kinerja Tim Pembina UKS secara baik guna meningkatkan dan mewujudkan kualitas kesehatan di Sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang, disamping itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan suatu teori yang baik bagaimana mengimplementasikan setiap program-program UKS yang baik dan berkualitas secara khusus di sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang.

2. Kegunaan Metodologis

Kegunaan penelitian ini secara Metodologis adalah, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kiat-kiat dan cara terbaik bagi Tim Pembina UKS di Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan setiap program yang ada.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan Dapat memberikan hasil atau manfaat pengetahuan praktis bagi tim pembina UKS, Guru, Sekolah serta siapa saja yang memiliki beban dalam dalam usaha meningkatkan serta mengembangkan derajat kesehatan di sekolah. Sebagai masukan bagi siapa saja yang tertarik dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini yang selanjutnya diharapkan ikut serta dalam memberikan kesadaran dan motivasi bagi setiap orang untuk pro aktif di dalam mensosialisasikan pentingnya menanamkan kesehatan di Sekolah-sekolah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Kinerja

Berbicara mengenai kinerja maka akan diketemukan berbagai pendapat yang berbeda-beda. Secara umum kinerja dapat dikatakan sebagai prestasi kerja, prestasi dari terselenggaraannya sesuatu kegiatan atau kerja baik itu individu maupun organisasi tertentu. Atau dengan kata lain kinerja dapat dikatakan sebagai penampilan cara –cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja.

kinerja dapat diartikan sebagai hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan perbuatan dalam situasi tertentu. Rue and Byar (1981) dalam (Keban, 1995:1) menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “ *the degree of accomplishment* “ atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan.

Pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (1995:1) :

“Kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lain”.

Bernardin dan Rusell (1998 : 379) menyebutkan bahwa :

“Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified time period (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu)”.

Hal senada juga disampaikan oleh Prawirosentono (1999:2) adalah :

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan Kinerja Mardiasmo (2001:125) menjelaskan bahwa ada 5 (lima) cara melakukan pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. indikator input, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (*output* maupun *outcome*).
- b. indikator output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
- c. indikator *outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal, informasi yang diperlukan untuk mengukur *outcome* seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh.
- d. indikator benefit, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator *outcome*. Benefit (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera tampak.
- e. indikator *impact* memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh. Seperti halnya indikator benefit, indikator *impact* juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.

Kumorotomo (1998:135) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang bersifat dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.
2. Efektivitas
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai ? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercakupan atau kepastian. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi.
4. Daya Tanggap.
Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja yang dilaksanakan.

2. Aspek- aspek Penilaian dalam Kinerja

Dyah Ayu Lestari Windi Astuti (2006:1) menjelaskan ada beberapa alasan untuk menilai kinerja. Pertama, penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji.

Kedua, penilaian memberi satu peluang bagi seseorang dan bawahannya untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahan. Hal ini memungkinkan untuk dapat mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan apa yang mungkin sudah digali oleh penilaian, dan mendorong hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh bawahan.

Ketiga, penilaian hendaknya berpusat pada proses perencanaan karir perusahaan, karena penilaian memberikan satu peluang yang baik untuk meninjau rencana karir orang dilihat dari kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkannya

Kinerja sebagai hasil kerja yang berasal dari adanya perilaku kerja serta lingkungan kerja tertentu yang kondusif. Dalam menentukan faktor penilaian individu pegawai, maka lingkungan kerja sebagai kesempatan untuk berprestasi yang dapat dipengaruhi oleh adanya peralatan kerja, kepemimpinan, kebijakan organisasi.

Penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, serta memonitor pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Brian F Manansal (2014:245) menjelaskan bahwa Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang amat penting

dalam keberhasilan kinerja dalam suatu instansi dalam upaya meningkatkan kepemimpinan yang efektif.

Penilaian kinerja merupakan suatu tugas administratif yang dilaksanakan oleh manajer, yang secara spesifik menjadi tanggung jawab fungsi sumber daya manusia. Penilaian kinerja salah satu bagian dari proses manajemen kinerja secara luas. Jadi manajemen kinerja merupakan suatu proses dimana manajer yaitu bahwa aktifitas dan *output* karyawan telah sesuai dengan sasaran organisasi.

Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Disamping itu, dengan adanya informasi kinerja maka dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan

Sri Trisnaningsih (2011:94) menambahkan Komitmen profesional akan mengarahkan pada motivasi kerja secara professional juga. Seorang profesional yang secara konsisten dapat bekerja secara profesional dan dari upayanya tersebut mendapatkan penghargaan yang sesuai, tentunya akan mendapatkan kepuasan kerjadalarn dirinya. Karena itulah motivasi tidak dapat dipisahkan dengan kepuasan kerja yang seringkali merupakan harapan kerja seseorang. Gambaran yang nyata akan hubungan ini adalah bahwa motivasi kerja menyumbang timbulnya kepuasan kerja yang tinggi. Kinerja akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan karyawan yang menjadikan motivasi kerjanya dapat terpenuhi.

Dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.

3. Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik adalah satu diantara sejumlah aktor lainnya dalam sistem kebijakan, suatu sistem kebijakan (*policy sistem*) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik antara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Dunn (1981; 55) menyebutkan adanya tiga tahap kebijakan, yaitu perumusan kebijakan (*policy formulation*), pelaksanaan/implementasi kebijakan (*policy imple-mentation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Perumusan kebijakan adalah kegiatan membuat formulasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Perumusan kebijakan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang paling berpengaruh dalam perumusan kebijakan dan apa dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan sesuai aturan, ketentuan, prosedur yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu.

Jenkins (1978; 15) menyebutkan bahwa kebijakan negara (*public policy*) adalah "*a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a*

specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut.)

Effendi (2001:75) mendefinisikan implementasi adalah apa yang terjadi setelah suatu peraturan perundangan ditetapkan dengan memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas (tangible), sedangkan tugas implementasi kebijakan itu sendiri adalah menjadi penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil (outcomes) melalui aktivitas-aktivitas pemerintah.

Lebih lanjut Effendi (2001:137), mengemukakan metode identifikasi alternatif kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Researched analysis and experimentation
2. Analisis tidak bertindak
3. Quick surveys
4. Review literature
5. Perbandingan dengan pengalaman dunia nyata
6. Passive collection and classifikasi
7. Tipologi
8. Analogi
9. Brainstorming
10. Perbandingan ideal

Dengan kata lain Implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dari strategi. Kegiatan itu menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

Proses implementasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai tindakan-tindakan baik dari institusi pemerintah maupun swasta atau kelompok masyarakat yang diarahkan oleh keinginan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Sedangkan implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan mencakup kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diberlakukannya kebijakan negara, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat/dampak nyata pada masyarakat. Kebijakan ditransformasikan secara terus menerus melalui tindakan-tindakan implementasi sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang pada akhirnya fase implementasi akan berpengaruh pada hasil akhir kebijakan.

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang kemudian diformulasikan di bidang-bidang isu kebijakan.

Proses implementasi kebijakan negara merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Implementasi program pemerintah melibatkan berbagai tingkatan struktur organisasi dan sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang (Wahab, 1997: 63) yaitu:

- a. Pemerakarsa kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga antar pejabat di tingkat yang lebih rendah. Penekanan utama terletak pada masalah sejauh mana sasaran-sasaran atau tujuan kebijakan telah tercapai dan apakah penyebab tujuan/sasaran tercapai atau tidak tercapai.
- b. Pejabat pelaksana di lapangan, fokusnya terletak pada upaya menanggulangi hambatan yang terjadi di wilayah kerjanya.
- c. Aktor perorangan di luar pemerintah kepada siapa proyek itu ditujukan, misalnya kelompok sasaran pengusaha kecil dan Koperasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pandangan/persepsi pejabat di pusat adalah sejauhmana pelayanan jasa yang direncanakan telah dilaksanakan. Dari sisi kelompok sasaran fokus perhatiannya adalah apakah pelayanan jasa yang telah diberikan pemerintah dapat mengubah pola hidupnya. Kinerja atau performansi suatu program selalu dikaitkan dengan aktivitas pencapaian tujuan kebijakan. Pencapaian tujuan itu sendiri merupakan aktivitas yang selalu ingin diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Dengan terwujudnya tujuan yang ditetapkan itu, maka dapat dilihat tingkat kinerja dari implementasi kebijakan tertentu.

Dunn (Dalam Wibawa, 1994:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Berbagai bentuk program atau kebijakan diformulasikan dan diimplementasikan penilaian terhadap keberhasilannya, apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, karena itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut.

Adapun konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya untuk menjabarkan keputusan lewat mekanisme birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1997 : 59).

Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Atau dengan kata lain implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992 : 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Kemudian apabila kinerja dikaitkan dengan implementasi kebijakan, maka dapat digambarkan bahwa sebuah kebijakan yang di ambil dan diputuskan hendaknya dapat menjadi sasaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan tidaklah harus idealis dan sempurna tetapi yang lebih penting dapat dipahami dan di realisasikan secara nyata di lapangan harus disusun dengan prosedur yang sederhana dan luas, serta dapat dipahami dengan mudah oleh pelaksana (Bryant dan White, 1987 : 108).

Kinerja dalam suatu kebijakan didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu kebijakan. kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar atau sasaran kebijakan. Tingkat tercapainya standar dan tujuan kebijakan ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh setiap orang yang terlibat.

James E Anderson (dalam Islamy,1994:) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, implikasi dari pengertian kebijakan publik ini adalah :

- 1) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- 2) Bahwa kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan pejabat pemerintah;
- 3) Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan pemerintah untuk dilakukan;
- 4) Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan
- 5) Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Merujuk berbagai pendapat di atas, maka implementasi kebijakan dapat memiliki akibat yang positif maupun berdampak secara negatif dalam hal penerapannya.

Berikut berbagai pengertian implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

Menurut Grindle bahwa pada *implementability* dari program, yang dapat dilihat dari : isi kebijakan yang mencakup 1) kepentingan yang terpengaruhi, 2) jenis manfaat, 3) derajat perubahan, 4) kedudukan policy maker, 5) siapa pelaksananya, 6) sumber daya ; dan konteks kebijakan yang mencakup 1) kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana, 2) karakteristik lembaga, 3) kepatuhan dan daya tanggap (Wibawa, 1994:22-24).

Menurut Sabatier dan Mazmanian mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi menjadi tiga kategori besar, yakni : (1) Karakteristik masalah, seperti : keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan, (2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, seperti : kejelasan tujuan, sumber keuangan yang mencukupi, integritas organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, (3) faktor-faktor diluar peraturan, seperti : kondisi sosio-ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. (Wibawa, 1994 : 25-26).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975 : 4) mengatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel (variabel bebas), yaitu : (1) *Standard and objective*, (2) *Resources*, (3) *Interorganizational communication and enforcement activities*, (4) *Characteristics of implementing agencies*, (5) *Economic, political and*

social conditions, dan (6) The disposition of implementors. (Wibawa, 1994 : 25-26).

Selanjutnya menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- (2) tersedia waktu dan sumber daya;
- (3) keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- (4) implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- (6) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- (7) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- (8) tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- (9) komunikasi dan koordinasi yang baik;
- (10) Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Dari berbagai pandangan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan atau program secara baik bukanlah hal yang mudah tetapi masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti kesulitan secara teknis, perilaku kelompok sasaran, kejelasan alokasi sumber daya, koordinasi, kondisi ekonomi, politik dan social dan budaya dimana kebijakan tersebut diterapkan.

Seperti yang disampaikan Peter Jennergren dalam Nystrom dan Starbuck (1981:43), makna dari *Performance* (Kinerja) adalah "Pelaksanaan tugas-tugas secara actual". Dengan demikian dapatlah disimpulkan yang mana *performance* (kinerja) itu merupakan "Suatu keadaan yang bisa dilihat sebagai gambaran dari hasil sejauh mana pelaksanaan tugas dapat dilakukan berikuk misi organisasi".

4. Gambaran Umum tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Hidup sehat seperti yang didefinisikan oleh badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Health Organization (WHO) adalah keadaan

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kesehatan jiwa adalah keadaan yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial yang optimal dari seseorang.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 45 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa "Kesehatan Sekolah" diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal sehingga diharapkan dapat menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Peserta didik itu harus sehat dan orang tua memperhatikan lingkungan yang sehat dan makan makanan yang bergizi, sehingga akan tercapai manusia soleh, berilmu dan sehat (SIS). Dalam proses belajar dan pembelajaran materi pembelajaran berorientasi pada head, heart dan hand, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan. Namun masih diperlukan faktor kesehatan (health) sehingga peserta didik memiliki 4 H (*head, heart, hand dan health*).

Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Selain itu juga menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas. Sedangkan secara khusus tujuan UKS adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri.

Di samping itu juga meningkatkan peran serta peserta didik dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah dan rumah tangga serta lingkungan masyarakat, meningkatkan keterampilan hidup sehat agar mampu melindungi diri dari pengaruh buruk lingkungan. Sasaran Usaha Kesehatan Sekolah Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS meliputi peserta didik sebagai sasaran primer, guru pamong belajar/tutor orang tua, pengelola pendidikan dan pengelola kesehatan serta TP UKS di setiap jenjang sebagai sasaran sekunder. Sedangkan sasaran tertier adalah lembaga pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah/TK/RA sampai SLTA/MA, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan perguruan tinggi agama serta pondok pesantren beserta lingkungannya. Sasaran lainnya adalah sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Sasaran tertier lainnya adalah lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar sekolah. Untuk belajar dengan efektif peserta didik sebagai sasaran UKS memerlukan kesehatan yang baik, Kesehatan menunjukkan keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan bagi peserta didik merupakan sangat menentukan keberhasilan belajarnya di sekolah, karena dengan kesehatan itu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara terus menerus. Kalau peserta didik tidak sehat bagaimana bisa belajar dengan baik.

Kesehatan merupakan salah satu elemen mendasar yang harus dimiliki oleh manusia, sebab tanpa kesehatan yang baik tidak mungkin seseorang dapat ambil bagian dan peran strategis dalam peningkatan sumber daya manusia untuk membangun serta berkarya nyata bagi masyarakat.

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai salah satu program yang langsung berhubungan dengan peserta didik sudah dirilis sejak tahun 1976 dan diperkuat tahun 1984 dengan terbitnya SKB 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diperbaharui pada tahun 2003.

Program Usaha Kesehatan Sekolah yang dikenal dengan Trias UKS yaitu Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan peserta didik yang sehat dan cerdas.

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 79 menyatakan bahwa "Kesehatan Sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan Jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan

dan kebangsaan. Di antara tujuan tersebut terdapat tujuan yang menyangkut kesehatan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan mental sosial, dimana keduanya sangat mempengaruhi terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya.

Salah satu modal pembangunan nasional adalah sumber daya manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal.

a. Arti dan Makna Logo UKS



VISI UKS : Mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas dan mandiri.

MISI UKS :

1. Menjalankan pola hidup bersih, bugar dan sehat.
2. Mencegah dan menghindari pengaruh negatif (kenakalan remaja, narkoba, seks bebas dsb)
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah yang sehat, nyaman dan aman untuk mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar.
4. Membiasakan diri berperilaku sehat yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/madrasah,(2003: 17) UKS mengimplementasikan programnya mengacu kepada beberapa program utama yaitu :

Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah, Ada tiga program pokok UKS di antaranya pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Upaya mengembangkan “Sekolah Sehat” (*Health Promoting School/HPS*) melalui program UKS perlu disosialisasikan dan dilakukan dengan baik. melalui pelayanan kesehatan (yankes) yang didukung secara mantap dan memadai oleh sektor terkait lainnya, seperti partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus menjadi HPS, yaitu sekolah yang dapat meningkatkan derajat kesehatan warga sekolahnya.

Upaya ini dilakukan karena sekolah memiliki lingkungan kehidupan yang mencerminkan hidup sehat. Selain itu, mengupayakan pelayanan kesehatan yang optimal, sehingga terjamin berlangsungnya proses pembelajaran dengan baik dan terciptanya kondisi yang mendukung tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat. Semua upaya ini akan tercapai bila sekolah dan lingkungan dibina dan dikembangkan.

Pembinaan lingkungan sekolah sehat dilakukan melalui pemeliharaan sarana fisik dan lingkungan sekolah, melakukan pengadaan sarana sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, melakukan kerja sama

dengan masyarakat sekitar sekolah yang mengandung lingkungan bersih dan sehat, dan melakukan penataan halaman, pekarangan, apotik hidup dan pasar sekolah yang aman. Seperti yang di sampaikan dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/madrasah,(2003: 21)

“Upaya lain yang dilakukan dalam pembinaan lingkungan sekolah sehat dan promosi gaya hidup sehat melalui pendekatan life skills education atau pendidikan kecakapan hidup. Setiap individu akan mengalami kehidupan yang sehat fisik dan mentalnya apabila dapat menuntaskan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Implikasi tugas perkembangan ini terhadap pendidikan adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan perlu disusun struktur kurikulum yang muatannya dapat memfasilitasi perkembangan kesehatan sebagai suatu kecakapan hidup (life skills).

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang diperlukan untuk hidup. yang meliputi pengetahuan, mental, fisik, sosial, dan lingkungan untuk mengembangkan dirinya secara menyeluruh untuk bertahan hidup dalam berbagai keadaan dengan berhasil, produktif, bahagia, dan bermartabat. Kembali ditegaskan dalam Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/madrasah,(2003: 15) :

WHO atau *World Health Organization* mendefinisikan kecakapan hidup sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Selain itu, dapat membantu seseorang menarik keputusan yang tepat, berkomunikasi secara efektif, dan membangun keterampilan mengelola diri sendiri yang dapat membantu mereka mencapai hidup yang sehat dan produktif. Sedangkan UNICEF memberikan definisi tentang kecakapan hidup yang merujuk pada kecakapan psiko-sosial dan interpersonal yang dapat membantu orang untuk mengambil keputusan yang tepat, berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah, mengatur diri sendiri, dan mengembangkan sikap hidup sehat dan produktif.

Pendidikan kecakapan hidup didasarkan atas konsep bahwa peserta didik perlu learning to be (belajar untuk menjadi), learning to learn (belajar untuk belajar) atau learning to know (belajar untuk mengetahui), learning to live with others (belajar untuk hidup bersama), dan learning to do (belajar untuk melakukan). Berdasarkan konsep ini, kecakapan hidup terbagi atas empat kategori yaitu kecakapan hidup personal learning to be), kecakapan hidup social (learning live with others), kecakapan hidup

akademik (*learning to learn/ learning to know*), dan kecakapan hidup vokasional (*learning to do*).

Setiap individu diuntut untuk memiliki Kecakapan personal, meliputi kecakapan dalam memahami diri dan kecakapan berfikir. Bagi peserta didik mempraktekkan kecakapan personal penting untuk membangun rasa percaya diri, mengembangkan akhlak yang mulia, mengembangkan potensi, dan menanamkan kasih sayang dan rasa hormat kepada orang lain. Kecakapan sosial, meliputi kecakapan berkomunikasi dan kecakapan bekerja sama

Mempraktekkan kecakapan sosial penting untuk membantu peserta didik mengembangkan hubungan yang positif, secara konstruktif mengelola emosi dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan yang menguntungkan masyarakat. Kecakapan akademik atau kecakapan intelektual.

Mempraktekkan kecakapan akademik penting untuk membantu peserta didik memperoleh kecakapan ilmiah, teknologi dan analitis yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam lembaga pendidikan formal dan tempat kerja. Kecakapan vokasional (*vocational skill*) atau kemampuan kejuruan terbagi atas kecakapan vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan kecakapan vokasional khusus (*occupational skill*). Mempraktekkan kecakapan vokasional penting untuk membekali peserta didik dengan kecakapan teknis dan sikap yang dituntut oleh perusahaan atau lembaga yang menyediakan lapangan kerja.

Keempat jenis kecakapan hidup itu menghasilkan individu yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, lahir atau bathin yang diperlukan untuk bertahan dalam lingkungan apa pun. Peserta didik memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumber daya secara optimal, sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas hidupnya.

Kecakapan hidup yang diperoleh oleh peserta didik melalui proses belajar bukan terjadi begitu saja, dapat dipraktekkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya dengan diberi contohnya oleh guru, orang tua dan anggota masyarakat. Kecakapan hidup membantu peserta didik secara positif dan adaptif mengatasi situasi dan tuntutan hidup sehari-hari.

Untuk itu sekolah mengembangkan kecakapan hidup peserta didik antara lain menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bekerja sama dengan masyarakat menyediakan berbagai keperluan sekolah menciptakan dan meningkatkan kesehatan peserta didiknya. Berikut adalah beberapa bagian penting dalam implementasi program UKS:

b. Tujuan Pembinaan dan Pengembangan UKS

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS adalah agar pengelolaan UKS mulai dari pusat sampai ke daerah dan sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpadu, terarah, intensif, berkesinambungan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS meliputi: Sasaran Primer Peserta didik Sasaran Sekunder : guru, pamong belajar/ tutor, komite sekolah/orang tua, pengelola pendidikan dan pengelola kesehatan, serta TP UKS disetiap jenjang. Sasaran Tertier : Lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah sampai pada sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan perguruan agama beserta lingkungannya.

Ruang lingkup UKS adalah ruang lingkup yang tercermin dalam Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS), yaitu sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan, yang meliputi aspek:

- a. Pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip-prinsip hidup sehat;
- b. Penanaman perilaku/kebiasaan hidup sehat dan daya tangkal pengaruh buruk dari luar;
- c. Pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di sekolah antara lain dalam bentuk:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pemeriksaan penjangkauan kesehatan peserta didik
- c. pengobatan ringan dan P3K maupun P3P;
- d. pencegahan penyakit
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. pengawasan warung sekolah dan perbaikan gizi;
- g. pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi dan hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan;
- h. rujukan kesehatan ke Puskesmas;
- i. Pemeriksaan berkala.

3) Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat, baik fisik, mental, sosial maupun lingkungan yang meliputi:

- a. Pelaksanaan 7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, kekeluargaan);
- b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan;

c. pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah (guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah dan masyarakat sekitar).

f. Landasan Hukum

Sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan melalui kerjasama lintas sektoral, landasan hukum Usaha Kesehatan Sekolah adalah:

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.
- 7) SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB/2003, Nomor : 1067/Menkes/ SKB/VII/2003, Nomor : MA/230 A/2003, Nomor : 26 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS.
- 8) SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2/P/SKB/2003; Nomor :

1068/Menkes/ SKB/VII/2003; Nomor : MA/230 B/2003; Nomor : 4415-404 Tahun 2003 tanggal 23 Juli 2003 tentang Tim Pembina UKS Pusat.

- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

g. Kebijakan dan strategi Pengembangan UKS

1. Kebijakan Umum

Yang dimaksud dengan kebijakan umum disini adalah kebijakan pelaksanaan dalam rangka memberikan landasan dan pedoman pembinaan dan pengembangan UKS untuk dilaksanakan secara terpadu, merata, menyeluruh, berhasil guna, dan berdayaguna. Kebijakan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Kesiambungan program UKS dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai tingkat SMA. Dengan sasaran cakupan anak umur 5-9 tahun baik anak yang normal maupun berlainan yang berada di sekolah dan luar sekolah, meliputi kegiatan:
- TK/RA
 - SD/MI/Paket A setara SD
 - SLTP/MTs/Paket B setara SMP
 - SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA
- b. Sanggar Kegiatan Belajar/PKBM b. Segala upaya peningkatan dan pengembangan kesehatan warga sekolah dan masyarakat lingkungan

- sekolah agar diupayakan melalui jalur Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS di daerah secara berjenjang ("one gate policy");
- c. Pembinaan dan pengembangan UKS dilaksanakan Secara Lintas Program dan Lintas Sektor melalui kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan;
 - d. Upaya pendidikan kesehatan diselenggarakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
 - e. Upaya pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh baik yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), dan kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif (pemulihan), namun lebih diutamakan pada upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari Puskesmas;
 - f. Upaya peningkatan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta UKS secara keseluruhan, dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat;
 - g. Tugas dan fungsi TP UKS pusat dan daerah disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - h. Optimalisasi program UKS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan UKS dilakukan dengan peran aktif pemerintah (pusat dan daerah), komite sekolah dan masyarakat.

2. Kebijakan Pelaksanaan

- a. Pemberdayaan kabupaten/kota dalam perencanaan terpadu (lintas program/lintas sektor), terkait operasional, serta tindak lanjut.
- b. Meninjau kembali program lama dan menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini termasuk mempertimbangkan adanya peraturan perundang-undangan yang baru;
- c. Mengupayakan program UKS yang integrated (lintas program/lintas sektor);
- d. Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dan LSM di dalam pengembangan program UKS;
- e. Meningkatkan dan memantapkan program UKS melalui:
 - Workshop/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi.
 - Pengembangan dan Akselerasi Program UKS.
 - Kemitraan.
- f. Melengkapi sarana dan prasarana UKS yang memadai;
- g. Meningkatkan peran Sekretariat TP UKS lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- h. Memfungsikan secara optimal peranan lembaga-lembaga pendidikan baik pada pendidikan formal maupun non formal;
- i. Meningkatkan dan mensosialisasikan program UKS ke instansi terkait di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan legislative

3. Langkah-langkah

Langkah-langkah yang diambil adalah :

- a. Menetapkan pola pembinaan dan pengembangan UKS, berupa peningkatan standar layanan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan program menuju Sekolah Promosi Kesehatan.
- b. Mengoptimalkan peran dan fungsi TP UKS dan Sekretariat TP UKS pada setiap jenjang pemerintahan.
- c. Meningkatkan cakupan yang dilanjutkan dengan mutu program UKS melalui keterpaduan program secara profesional.
- d. Menyelenggarakan upaya promotif dan preventif untuk menanggulangi dan mencegah masalah kesehatan jiwa yang mendesak seperti ketergantungan kepada narkotika, kebiasaan merokok, minuman keras dan bahan berbahaya, kenakalan remaja, kriminalitas/perilaku negatif peserta didik;
- e. Mengoptimalkan program-program "Life Skill Education" khususnya dalam upaya meningkatkan keterampilan psikososial, yang pengembangannya melalui kemasn subtansi kesehatan atau melalui Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat
- f. Mengupayakan pengadaan tenaga pembina UKS, sarana dan prasarana serta pemeliharaannya baik di pusat maupun di daerah;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan UKS secara terpadu, teratur, dan terencana; dan
- h. Membangkitkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan UKS.

4. Strategi Pelaksanaan

- a. Seluruh jajaran Tim Pembina UKS perlu memperkuat dan meningkatkan fungsi konsultatif dan advokasi terhadap program-program UKS secara menyeluruh;
 - b. TP UKS Pusat menyusun kebijakan yang bersifat operasional di daerah dilimpahkan kepada daerah dengan memperhatikan kesehatan fisik, mental dan sosial dengan penekanan pada paradigma sehat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat;
 - c. Meningkatkan peran serta komite sekolah dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha/LSM/ masyarakat lainnya. Masing-masing sektor/kementerian menempatkan UKS sebagai program prioritas. Masing-masing sektor/ kementerian mengalokasikan dan program UKS sesuai dengan tupoksinya.
 - d. Mengoptimalkan peranan lembaga-lembaga pendidikan yang ada baik pada jalur sekolah, maupun jalur luar sekolah sesuai jenis dan jenjang pendidikan terhadap program UKS.
- Perlunya memantapkan standar pelayanan minimal SPM UKS sebagai masukan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan legislatif;
- f. Melakukan pertemuan-pertemuan periodik/ sebagai forum komunikasi dan konsultasi secara nasional setiap 2 (dua) tahun sekali dan daerah setiap tahun.

5. Fungsi Koordinasi

Salah satu elemen penting dalam sebuah organisasi adalah koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu faktor penentu dalam menggapai suatu tujuan, karena koordinasi erat kaitannya dengan kekompakan dan kerjasama tim antar lembaga atau kelompok. Koordinasi adalah tindakan seorang manajer untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/bagian yang satu dengan orang/bagian yang lain.

Dengan koordinasi ini diartikan suatu usaha kearah keselarasan kerja antara yang satu dengan yang lain, sehingga diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran, ketidaktepatan, serta dobel pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini berarti bahwa pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Koordinasi menjadikan organisasi atau beberapa organisasi bergerak sebagai sistem dalam arti adanya sinergisme yaitu totalitas kegiatan yang menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan jumlah output masing-masing komponen bila bergerak sendiri-sendiri, sebab sesungguhnya koordinasi menghasilkan sebuah tim yang solit dan kuat dalam hal kinerja.

Koordinasi merupakan hal yang sangat perlu ada dalam sebuah organisasi, oleh karena koordinasi merupakan suatu tindakan untuk saling memadukan antara sub bagian atau bagian dari berbagai tugas yang diemban masing-masing yang sangat berguna bagi pencapaian tujuan organisasi sesuai misi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Stoner dan Freeman(1992:383), bahwa :

“Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien”.

Selanjutnya, menurut Darwin (1994:15) bahwa :

“Dalam melakukan pembagian kerja terhadap suatu kesatuan tugas yang besar (*the whole*) perlu diperhatikan integrasi di antara bagian-bagian (*parts*). Untuk bisa demikian harus ada koordinasi”.

Menurut Suganda,(1998:11)., Koordinasi itu meliputi :

- a). Menurut lingkupnya, terdapat :
 1. Koordinasi intern ialah koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
 2. Koordinasi ekstern ialah koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- b). Menurut arahnya, terdapat :
 1. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hirarki yang sama dalam suatu organisasi dan antar pejabat dari organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.
 2. Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat atau unit-unit tingkat bawah, oleh pejabat atasannya atau unit-unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
 3. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hirarkinya.
 4. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau karena koordinatormya mempunyai fungsi tertentu.

Dilihat dari fungsinya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menjamin kelancaran mekanisme kerja dari berbagai unsur yang ada di dalam sebuah tim atau organisasi
- b. Mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas dalam tim atau organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- c. Berperan penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab

- d. Menjamin akan terlaksananya kualitas kerja yang bermutu dan berdaya guna.

Tujuan koordinasi adalah :

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran .
- b. Untuk menjuruskan ketrampilan spesialis ke arah sasaran .
- c. menghindari kekosongan dan tumpang tindih Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran
- d. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan ke arah sasaran organisasi atau perusahaan
- e. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran .

Cara-cara Mengadakan Koordinasi.

- a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat.
- b. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tetap harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
- c. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri.
- d. Tujuan itu adalah tujuan bersama.. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan lain sebagainya.
- e. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.

- f. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.

Bagaimana Hubungan Koordinasi dengan Fungsi-fungsi Manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Koordinasi (Planning and Coordination)
Perencanaan akan mempengaruhi koordinasi artinya semakin baik dan terincinya rencana maka akan semakin mudah melakukan koordinasi.
- b. Jika perencanaan disusun dengan baik dan hubungan rencana jangka panjang (Long range planning) dan rencana jangka pendek (short range planning) terintegrasi dengan baik serta harmonis, maka penerapan koordinasi akan lebih mudah.
- c. Pengorganisasian dan Koordinasi (Organizing and Coordination)
Pengorganisasian berhubungan dengan koordinasi, artinya jika organisasi baik, maka pelaksanaan koordinasi akan lebih mudah. Organisasi yang baik, apabila hubungan-hubungan antara individu dan karyawan baik, hubungan pekerjaan baik, job description setiap pejabat jelas.
- d. Pengarahan dan Koordinasi (Directing and Coordination)
Pengarahan mempengaruhi koordinasi, artinya dengan menggunakan bermacam-macam variasi dan intensitas directing force akan membantu menciptakan koordinasi.
- e. Pengisian Jabatan dan Koordinasi (Staffing and Coordination)
Penempatan karyawan membantu koordinasi, artinya jika setiap pejabat sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya, maka koordinasi akan lebih mudah

f. Pengendalian dan Koordinasi (Controlling and Coordination)

Pengendalian berhubungan langsung dengan koordinasi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam melaksanakan koordinasi perlu suatu landasan yang kuat, yaitu adanya kedisiplinan dari setiap pekerja. Dengan adanya kedisiplinan tersebut maka dapat diharapkan semua instruksi, saran dan sebagainya ditaati dengan baik.

Berkaitan dengan Kinerja di dalam Tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten sintang, Koordinasi menjadi mutlak diperlukan sebab di dalam alur kerjanya Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang terdiri dari banyak instansi terkait yang tergabung di dalamnya. Sehingga kinerja akan baik apabila mekanisme kerja akan terjalin baik hanya apabila terjadi komunikasi dan koordinasi yang baik bagi setiap individu yang tergabung di dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang.

6. Kajian Terhadap penelitian terdahulu

Sejauh pengamatan penulis dalam melakukan penelitian tidak ditemukan penelitian yang memiliki kesamaan dalam arti fokusnya sama membahas tentang Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam mengimplementasikan program Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang. Namun demikian penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama atau masih relevan dengan yang penulis teliti, di antaranya:

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh H. Jejen Hendra Permana (2002) dengan judul “ Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakerta” dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada bagaimana Kinerja Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Purwakerta sebagai Dinas yang mengambil peran penting untuk menangani lingkungan Hidup. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purwakerta mengeluarkan kebijakan berupa Perda Kabupaten Purwakerta Nomor 22 Tahun 2000 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Purwakerta. Salah satu dinas yang dibentuk tersebut diantaranya adalah Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur oleh Keputusan Bupati Purwakerta Nomor 17 Tahun 2001.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pengembangan dari Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakerta. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pertambangan dan tugas pemantauan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas yang berat dalam mengelola lingkungan hidup, sebab pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu yang mencakup segala aspek kehidupan yang sangat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Semua aspek kegiatan pembangunan tidak lepas dari keterkaitan dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan.

Dalam penelitian ini peneliti menyoroti beberapa hal penting yang diperlukan untuk meningkatkan Kinerja di Dinas Lingkungan Hidup di antaranya adalah: Kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakerta yang dilihat dari tiga indikator tersebut, dipengaruhi variabel internal organisasi,

Pertama, variabel struktur organisasi, yakni struktur organisasi yang ada belum menampung seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendelegasian wewenang, belum sesuai penempatan pegawai menurut spesialisasi yang diketahui dengan belum terisinya jabatan fungsional dan tingkat pendelegasian pegawai dalam pelaksanaan tugas yang diketahui dengan tidak adanya sub dinas yang menangani masalah pertambangan dan energi.

Kedua, variabel sumber daya manusia, yakni kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan yang diketahui dari belum adanya pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan dari pertambangan maupun elektro, serta kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki pegawai.

Ketiga, variabel finansial, yakni anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi belum memadai dan kecilnya biaya operasional untuk menunjang pencapaian misi dan tujuan organisasi. Ketiga variabel internal organisasi tersebut mempengaruhi kinerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten Purwakarta.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf (2003) dengan judul "Kinerja Lembaga Legislatif"(Studi Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang) dalam penelitian ini fokus membahas dan menyoroti tentang kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang. Adapun temuannya adalah bahwa Kabupaten Deli Serdang secara umum dikatakan kinerja DPRD masih sangat rendah, rendahnya kinerja ini dilihat dari belum berjalannya peran, tugas dan fungsi DPRD secara baik. Permasalahan rendahnya kinerja DPRD tersebut bila ditinjau

dari faktor-faktor sebagai berikut: 1) Akuntabilitas, hal ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya kebijakan dan organisasi publik konsisten dengan kehendak rakyat, sehingga pertanggungjawaban oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat daerah belum efektif. 2) Responsivitas, dimana belum menunjukkan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah sebagai salah satu fungsi DPRD itu sendiri. 3) Efektifitas, dimana dalam pelaksanaan fungsi DPRD khususnya dalam fungsi legislasi belum ada keputusan DPRD, Keputusan Daerah dan Peraturan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Begitupun dari fungsi pengawasan yang terjadi justru sebagai bentuk kecurigaan terhadap Pemerintah Daerah, bukan sebagai kontrol yang membangun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari uraian di atas yang diperoleh rendahnya kinerja tersebut dipengaruhi karena belum adanya sosialisasi dan orientasi dalam bentuk pelatihan bagi lembaga DPRD dalam pelaksanaan fungsinya secara teknis. Disamping itu juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan DPRD dalam menganalisa dan menjabarkan Peraturan Daerah yang ada. Disamping faktor-faktor yang telah disebutkan di atas menurut penulis secara kongkret beberapa kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD tersebut meliputi :

Pertama, secara Kelembagaan (organisasi), kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki serta belum jelasnya anggaran dan pembiayaan oprasional kegiatan DPRD disamping tunjangan dan insentif berupa uang sidang. *Kedua*, dari segi Sumber Daya Manusia, masih rendahnya tingkat pendidikan DPRD serta

minimnya pengalaman dibidang organisasi, politik, maupun pemerintah. *Ketiga*, dari segi Informasi, kurangnya media dan sumber informasi serta kurangnya keterbukaan dan intensitas DPRD dalam menyerap informasi yang berkembang dimasyarakat.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Alizar (2002) dengan judul “ Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Dalam Era Otonomi. Peneliti berusaha melihat apa saja tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Kota Pekanbaru. Adapun tugas Bagian Organisasi Sekretariat Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan Bagian Organisasi tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Perda Nomor : 06 Tahun 2001 dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Perda Nomor : 07 Tahun 2001 terlihat masih ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas antara Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah bergulir seharusnya Bagian Organisasi secara sigap menyikapinya dengan menganalisa jabatan yang ada melalui tugasnya yang ada berdasarkan SOT, namun keadaan ini belum juga disikapi secara realitas. Selanjutnya pembentukan

Unit Pelayanan Terpadu yang merupakan gagasan dari Bagian Organisasi sebagai realisasi untuk ke arah pelayanan kepada masyarakat dengan baik belum juga diarahkan ke bentuk yang lebih sempurna dari suatu lembaga yang kurang memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat sebagai pelayanan yang baik pada saat ini. Bila dilihat dari hasil analisis yang diadakan, seharusnya realisasi untuk Penggabungan atau penambahan organisasi yang baru maupun penyatuan dua organisasi menjadi satu untuk lebih efisien masih juga ada yang belum direalisasikan oleh Bagian Organisasi untuk mengantisipasi secara cepat perkembangan dan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.

Siklus pekerjaan yang ada dalam lingkup Bagian Organisasi masih mengalami keterlambatan, para staf dalam menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat, namun masih juga mengalami keterlambatan yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam berbagai urusan pelayanan terhadap masyarakat tentunya. Dapat dilihat dari mulai dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan diikuti dengan UU Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Bagian Organisasi baru bisa menyelesaikan Perda tentang Susunan Organisasi bagi organisasi yang ada di Pemda Kota Pekanbaru lebih dari enam bulan.

Berdasarkan uraian di atas ada tugas dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Kota Pekanbaru yang belum dilaksanakannya sebagaimana harusnya. Dengan demikian maka permasalahan yang timbul adalah suatu pertanyaan “ Bagaimana Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Era Otonomi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya”? pada bagian akhir dalam penelitian ini menemukan bahwa beerapa faktor yang mempengaruhi

Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Era Otonomi adalah :

1. Faktor Karakter individu, yaitu bahwa sifat dan karakter sangat menentukan seperti apa suatu sistem dalam organisasi dan kelembagaan berlangsung
2. Lingkungan, faktor dominan yang mempengaruhi kinerja bagian organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Era Otonomi.
3. Sarana dan Prasarana, menjadi faktor penunjang dalam melaksanakan tugas serta kinerja dalam di bagian organisasi di bagian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru dalam Era Otonomi

Setelah melakukan pembahasan mengenai ketiga jenis penelitian terdahulu oleh penulis yang berbeda, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan, di antaranya penelitian yang penulis lakukan juga fokus membahas tentang kinerja dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja.

Berdasarkan kajian terhadap ketiga penelitian terdahulu maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian penulis dengan kajian terdahulu adalah dalam penelitian ini penulis fokus membahas pada kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang, dan sejauh yang penulis ketahui penelitian yang fokus membahas tentang UKS sangat lah minim, hal ini lah yang membuat penelitian penulis memiliki kekhasan dari penelitian-penelitian lainnya.

7. Alur Pikir:

Alur pikir dalam penelitian yang penulis lakukan digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



8. Definisi Operasional

Definisi operasional sering dijelaskan sebagai suatu spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur variabel. Menurut (Sofian Effendi, 1989 : 46), variabel operasional dijelaskan sebagai unsur peneliti yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa definisi operasional akan mampu menjelaskan fenomena secara tepat.

Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

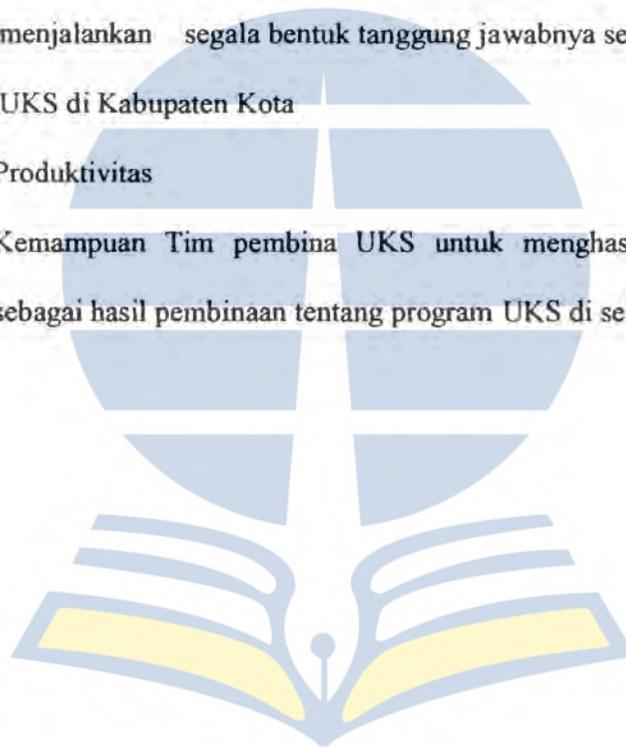
Kemampuan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang untuk melaksanakan program UKS di sekolah-sekolah secara Efektif dan efisien.

2. Resposibilitas

Kemampuan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang untuk menjalankan segala bentuk tanggung jawabnya sebagai tim pembina UKS di Kabupaten Kota

3. Produktivitas

Kemampuan Tim pembina UKS untuk menghasilkan bukti nyata sebagai hasil pembinaan tentang program UKS di sekolah-sekolah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sesuai dengan apa yang penulis temukan di lapangan. Dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak.

Metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Suharsimi Arikunto, 1996:16). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari sejauh mana kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang dalam mengimplementasikan program yang telah di rencanakan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah ditujukan khusus kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang yang memiliki kantor sekretariat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang bertugas melakukan pembinaan dan mengimplemantasikan program UKS dengan harapan dapat menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat penulis meneliti adalah Sekretariat UKS yang terletak di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, serta Tim pembina UKS termasuk di dalamnya adalah instansi-instansi terkait.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah pejabat yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key-informan*). Lebih jelasnya kunci informasi penelitian ini adalah dalam menjelaskan rendahnya kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, maka data yang diperlukan sebagai berikut :

1. Data Umum (Sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang

tertulis yang bersumber pada dokumen, sehingga disebut data dokumenter, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian. Atau dengan kata lain data skunder sebagai pelengkap dari data primer.

2. Data Khusus (Primer)

Data primer diperoleh dalam bentuk verbal, kata-kata atau ucapan lisan atau perilaku dari subjek. Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terpilih dan terpercaya .

E. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Lofland sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain (dalam Moleong, 2001 : 112).

Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan rendahnya kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, hasil pengamatan di lapangan.

Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian penelitian melalui prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian (Nazir,1988:17). Dalam upaya menghimpun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer, melalui observasi langsung dan wawancara dengan sumber informasi terpilih yang relevan dengan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk memperoleh data yang represif, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan (Obsevasi).

Pengamatan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan langsung, supaya dapat diolah dan dianalisis secara baik dan relevan. Singkatnya teknik observasi memungkinkan peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dilapangan. Melalui teknik observasi ini peneliti langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengidentifikasi sifat dan keadaan daerah penelitain. Tujuannya untuk mengamati mengapa rendahnya kinerja dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang.

2. Wawancara

wawancara peneliti lakukan guna memperoleh sumber informasi yang akurat serta dipergunakan untuk memperoleh data, keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang lebih banyak. Dengan teknik wawancara, peneliti akan memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Wawancara akan ditujukan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang yang dipilih secara random, dengan tujuan

semua anggota berpeluang untuk menjadi informan. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas Wawancara mendalam akan ditujukan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang : Maka peneliti juga akan mengumpulkan data dari beberapa unsur yang terkait.

Dengan kata lain wawancara adalah dilakukan dengan cara bertatap muka dengan responden secara langsung untuk mengadakan tanya jawab mengenai masalah-masalah yang diteliti. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berintegrasi dan mempengaruhi arus informasi. (Irawati, dalam Sofian Efendi, 2002 : 192

3. Dokumentasi

Dokumentasi telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Oleh karena itu penggunaan dokumen merupakan hal yang tidak terabaikan lagi. (Moleong, 2001 : 16). Dokumentasi dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk memperoleh data skunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer.

Dokumen-dokumen yang di gunakan adalah dokumen yang relevan dan bermanfaat dalam mendukung penelitian. Dalam hal ini adalah dokumen yang berkaitan dengan segala kegiatan di dalam Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, secara khusus di Sekretariat UKS.

F. Metode Analisis Data

Di dalam mendapatkan hasil yang akurat peneliti menggunakan Metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini digunakan dengan pertimbangan :bahwa objek kajian yang penulis lakukan adalah hanya bersifat uraian atau analisis dari data-data yang diketemukan dilapangan.

Analisis dilakukan dengan melihat kondisi yang sebenarnya terhadap rendahnya kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang.



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang

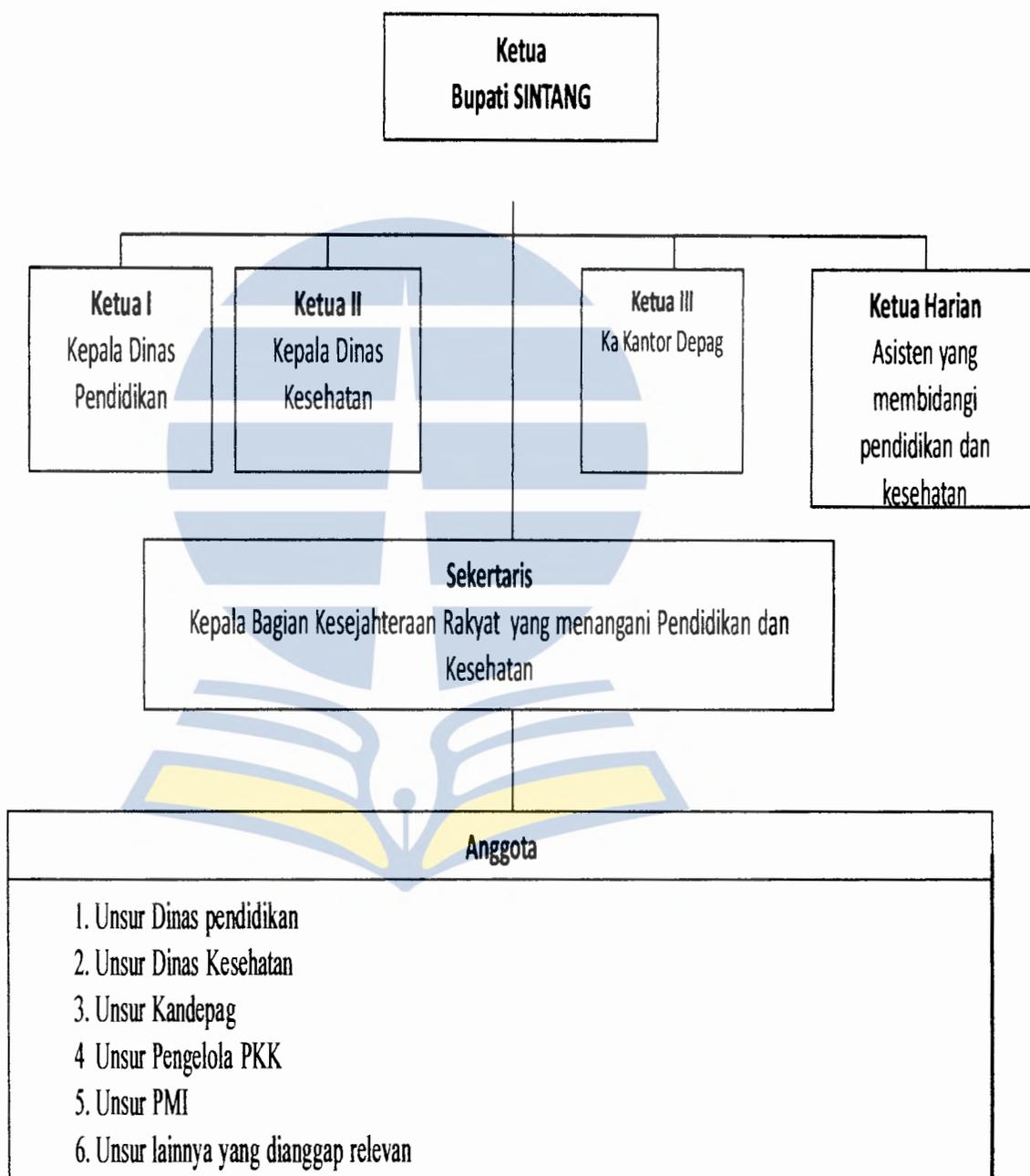
Dalam tanggung jawabnya sebagai tim pembina UKS, tim pembina UKS Kabupaten Sintang memiliki tugas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 441/14/KEP-KESRA/2013 tentang penyelenggaraan Program UKS di Kabupaten Sintang.

Tugas tersebut terangkum di dalam program-program yang harus di implementasikan secara nyata. Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang berfungsi sebagai pembina, koordinator dan pelaksana program UKS di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. tugas Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang meliputi: Menyusun Petunjuk Teknis UKS; Mensosialisasikan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS; Melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS; Menjalin hubungan baik dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM sesuai ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan UKS; Membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS Provinsi; Melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.

Susunan Tim Pembina UKS bertujuan untuk mempermudah pembagian tugas dan wewenang dari Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang yang dapat dilihat dari bagan berikut:

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang



Fungsi Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota adalah Sebagai pembina, koordinator dan pelaksana program UKS di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat, provinsi dan kab/kota. Adapun Tugas Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada kebijaksanaan/pedoman yang
- b. ditetapkan TP-UKS Pusat dan TP-UKS Provinsi.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan UKS di daerahnya.
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah dan perguruan agama.
- e. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka menggerakkan pelaksanaan UKS di Kecamatan.
- f. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah/madrasah.
- g. Mengevaluasi, mengendalikan, membimbing dan mencatat pelaksanaan UKS oleh TP-UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS.
- h. Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Pusat dan Provinsi.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh Instansi terkait di daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Kementerian/instansi masing-masing.
- j. Mengadakan penelitian dan penilaian serta pengembangan UKS di daerahnya.
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan secara teratur dan laporan insidental sesuai kebutuhan ke TP – UKS Provinsi.
- l. Mengadakan Rakerda yang diikuti oleh seluruh TP-UKS Kecamatan sekali setahun.

Dari sekian banyak tugas pokok yang dimiliki Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang, penulis hanya akan menganalisis sebagian dari tugas yang menjadi tugas sehari-hari yaitu melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah mengenai cara menerapkan pola hidup sehat, yang dapat dilihat dari segi Efektifitas, Responsibilitas dan Produktivitas.

B. Kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu lembaga tertentu dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih mendalam dan berkualitas.

Dalam hal ini Tim pembina UKS sebagai pembina sekaligus kordinator dan pelaksana UKS di daerahnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten kota. Permasalahan dilapangan adanya kecendrungan Tim Pembina UKS dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina sekaligus kordinator dalam mensosialisasikan pola hidup sehat di sekolah-sekolah belumlah maksimal.

Masih kurang kuatnya komitmen dan kinerja para anggota Tim pembina UKS untuk melaksanakan pembinaan UKS di sekolah-sekolah menyebabkan kurang maksimalnya pengetahuan tentang bagaimana cara hidup sehat di sekolah-sekolah oleh para siswa. Dari sekian banyaknya anggota tim pembina UKS tetapi yang aktif dalam melakukan pembinaan dan monitoring kelapangan hanya beberapa saja yang proaktif.

Fenomena seperti ini sudah pasti berakibat secara nyata terhadap kelancaran serta hasil kerja dari tidak maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh tim. Seharusnya tim yang baik memiliki kekompakan serta intensitas kerja yang solid dan tinggi sehingga dapat memiliki hasil kerja yang maksimal.

Keadaan di atas dipertegas dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim UKS Kabupaten Sintang, Teodetty mengatakan bahwa :

“Di dalam Tim pembina UKS Kabupaten Sintang sebenarnya sudah memiliki tugas dan Fungsi masing-masing tetapi rendahnya minat serta motivasi dari anggota tim menyebabkan kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan kesekolah-sekolah, hal ini diperparah lagi oleh malasnya

anggota tim dalam mengikuti rapat, dan sering terjadi lempar tanggung jawab di dalam anggota tim, hal ini terjadi dari tahun ketahun. Akibatnya pengajaran tentang kesehatan sekolah tidak dapat ditransfer ke siswa dengan baik.”.

Permasalahan seperti di atas memang dapat dikatakan sebagai permasalahan umum dari perilaku manusia umumnya tetapi apabila sistem dan perilaku seperti tim pembina UKS yang diberi tanggung jawab besar dari Pemerintah untuk melakukan pembinaan UKS kesekolah-sekolah secara terus menerus berlangsung seperti itu maka akan berakibat secara nyata terhadap buruknya dan rendahnya kesadaran dari generasi muda terutama anak sekolah dalam melakukan serta memiliki perilaku hidup sehat.

Dengan kata lain logis saja bila anak-anak sekolah masih banyak yang membuang sampah sembarangan serta jajan di tempat-tempat yang tidak bersih tanpa memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Keadaan seperti ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan apakah Tim Pembina UKS telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang dan hak yang diberikan sepenuhnya kepada mereka oleh pemerintah pusat, sebab setiap tahun Pemerintah selalu menganggarkan dana untuk melakukan pembinaan UKS, dengan harapan tingkat kesadaran dan perilaku akan hidup sehat dapat dimiliki oleh anak-anak di sekolah-sekolah. Juga dipertanyakan, apakah lomba sekolah sehat (LSS) yang dilaksanakan setiap tahun akan berdampak terhadap perilaku hidup sehat ke siswa di sekolah-sekolah atau hanya sekedar rutinitas dan kegiatan tahunan demi hanya menjalankan program dan menghabiskan anggaran Pemerintah.

Kualitas serta hasil kinerja pembinaan UKS Kabupaten Sintang memang tidak bisa diukur dengan mudah sebab hasil kinerja tersebut dapat dilihat dari pola

perubahan perilaku anak-anak didik di sekolah, tetapi hal ini juga tidak akan menjamin bahwa perilaku di sekolah akan juga berlaku sama ketika anak-anak di rumah. Atau juga dapat dilihat dari hasil lomba Sekolah Sehat (LSS) yang dilaksanakan setiap tahun. Dari kategori penilaian di atas juga tidak dapat dijadikan tolak ukur kinerja tim pembina UKS secara absolut, tetapi paling tidak bisa memberikan gambaran tentang hasil kinerja tim pembina UKS.

Oleh karena itu untuk melihat hasil kinerja ini diperlukan beberapa indikator kinerja yang akan dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:

C. Indikator Kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang

Dalam bagian ini penulis akan berusaha untuk melakukan analisa dan pembahasan terhadap kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang. Kajian tentang kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang kaitannya dengan peran yang diembannya memiliki nilai yang strategis, sehingga informasi tentang kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang ini menjadi penting untuk diketahui. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pada tataran ini indikator menggambarkan tingkat pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang adalah Efektivitas, diukur : Apakah dari pelaksanaan kegiatan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang dan kebijakannya telah sesuai dengan fungsi dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Responsivitas, diukur: Seberapa jauh anggota Tim pembina UKS Kabupaten Sintang tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan Kebutuhan siswa.

Produktivitas diukur: Apakah tujuan, rencana dan program dari Tim pembina UKS Kabupaten Sintang sebagai pelaksana dari pembinaan kesehatan kepada sekolah-sekolah dapat di fungsikan dengan baik dan memiliki hasil yang telah dicapai.

Alasan penulis hanya memilih ketiga indikator tersebut di atas adalah karena penulis beranjak dari permasalahan yang ada di dalam Tim pembina UKS Kabupaten Sintang yaitu kurang efektifnya kinerja tim pembina UKS di Kabupaten Sintang, kurangnya daya tanggap atau respon dari setiap anggota terhadap tanggung jawab yang telah di embannya selaku tim pembina UKS, serta minimnya hasil atau produktivitas yang telah dicapai tim pembina UKS Kabupaten Sintang.

1. Efektivitas Tim pembina UKS

Efektivitas disini akan diukur dari seberapa besar kegiatan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang dan apakah telah sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai pembina dan koordinator sekaligus pelaksana program UKS ditinjau dari pandangan masyarakat, siswa, dan para guru di sekolah. Menurut informasi yang penulis dapat, kinerja Tim Pembina UKS masih jauh dari apa yang disebut maksimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tokoh masyarakat Bapak Lutfi, mengatakan :

“Menurut pendapat saya pembinaan yang telah dihasilkan oleh Tim pembina UKS Kabupaten Sintang belum mampu memberikan dampak

secara nyata bagi para siswa di sekolah, sebab siswa disekolah hanya tahu sebatas pengetahuan saja tetapi ketika sampai dirumah mereka tidak mengingat dan mempraktekkan, ditambah lagi pembinaan yang dilakukan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang hanya sebentar saja dan hanya sebatas ketika sekolah yang bersangkutan terpilih untuk menjadi perwakilan lomba sekolah sehat, sehingga hal ini tidak memiliki dampak jangka panjang. menjawab ”.

Dari penjelasan tersebut di atas dan berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan memang dapat dikatakan bahwa Efektivitas kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang yang telah dihasilkan belum mampu menjawab kebutuhan tentang pentingnya mensosialisasikan kesehatan disekolah-sekolah.

Hal ini semakin diperparah lagi oleh banyaknya tim pembina UKS Kabupaten Sintang yang jarang sekali turun kelapangan sehingga wajar saja kalau kinerja dari Tim pembina UKS Kabupaten Sintang menjadi tidak optimal.

Senada dengan pendapat tersebut, seorang tokoh masyarakat Bapak Abui mengatakan bahwa :

“Menurut hemat saya terelepas dari berbagai prestasi yang telah diperoleh Tim pembina UKS Kabupaten Sintang tetap saja efektivitas dari pembinaan di lapangan tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya kesadaran para siswa disekolah yang seenaknya membuang sampah-sampah sembarangan dan masih banyak siswa yang suka merokok, fenomena ini dapat dijadikan indikator bahwa prilaku hidup sehat di sekolah belum sepenuhnya diterima oleh siswa.”.

Senada dengan pendapat tersebut di atas, menurut staf pengajar di SMP 1 Pandan Kecamatan sungai tebelian Bapak Kurniadi mengatakan bahwa :

“Menurut saya dalam melakukan pembinaan di sekolah-sekolah kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang jauh dari apa yang

dikatakan maksimal, sebab ketika turun kelapangan untuk melakukan pembinaan yang datang hanya beberapa orang saja itu pun hanya melihat-lihat dan memberikan arahan tanpa memberikan sosialisasi yang real. Sehingga kegiatan tersebut hanya seperti memenuhi tugas semata tanpa ada sasaran atau gol yang jelas. Ditambah lagi minimnya bantuan serta sarana persarana penunjang yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dibina.”.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan fungsi Tim pembina UKS Kabupaten Sintang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang serta kinerjanya belum ada yang nampak yang sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, apalagi konsisten dengan kehendak masyarakat yang menginginkan anak-anaknya untuk di bina dan diarahkan supaya memiliki pola hidup sehat.

Salah satu tugas yang sangat mendasar dari Tim pembina UKS Kabupaten Sintang adalah melakukan pembinaan ke Sekolah-sekolah dalam mensosialisasikan mengenai berbagai program UKS yang sudah menjadi tugas dan fungsinya selaku penerima mandat dari Pemerintah untuk bertanggung jawab dengan program UKS nya di Daerah. Tetapi kenyataan dilapangan masih sangat mengecewakan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu siswa SMA 2 Sintang Herman, mengatakan:

“Menurut pendapat saya berdasarkan apa yang saya lihat, program UKS hanya menjadi seperti penting ketika ada perlombaan sekolah sehat, sebab yang motivasi utama adalah mengejar juara, dan pada waktu itulah tim pembina UKS datang mengarahkan berbagai hal apa dan bagaimana yang harus di buat oleh guru dan murid untuk persiapan lomba sekolah sehat. Sedangkan ketika tidak ada lomba maka sama sekali tidak ada pembinaan dan kunjungan kesekolah kami yang berkaitan dengan UKS”.

Merujuk pada pendapat di atas maka dapatlah diketahui bahwa pembinaan dilapangan oleh tim pembina UKS Kabupaten Sintang tidak bersifat kontinuitas melainkan hanya sewaktu ada perlombaan. Maka dari fakta di atas berarti bahwa kinerja tim pembina UKS Kabupaten sangat lah tidak maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa.

TABEL 4.1
DATA PEMBINAAN UKS (TK,SD,SMP,SMA)SEKABUPATEN SINTANG
TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	PUSAT	TK				SMP			SMA		
			UKS	DIBINA	UKS	DIBINA	UKS	DIBINA	UKS	DIBINA		
1	SINTANG	TANJUNG PURI	1	1	100	47	5	11	15	7	47	4
		SUNGAI DURIAN	0	0		16	10	63	6	1	17	1
		DARA DJUANTI	0	0		26	15	58	8	1	13	1
2	KELAM PERMAI	KEBONG	0	0		45	13	29	10	4	40	2
		NANGA LEBANG	0	0		28	11	39	7	1	14	0
3	TEMPUNAK	TEMPUNAK	0	0		28	9	32	6	1	17	1
		JELIMPAU	0	0		12	3	25	2	0	-	0
4	SEPAUK	SEPAUK	0	0		34	6	18	6	2	33	1
5	SUNGAI TEBELIAN	PANDAN	0	0		32	12	38	7	1	14	2
6	DEDAI	DEDAI	0	0		25	6	24	6	1	17	1
		EMPARU	0	0		29	7	24	7	1	14	0
7	BINJAI HULU	MENSIKU	0	0		29	9	31	7	1	14	0
8	KETUNGAU HILIR	NANGA KETUNGAU	0	0		26	9	35	6	1	17	1
		SERANGAS	0	0		22	7	32	4	1	25	1
9	KETUNGAU TENGAH	MERAKAI	0	0		15	5	33	6	1	17	2
10	KETUNGAU HULU	SENANING	0	0		17	3	18	2	1	50	1
11	KAYAN HILIR	NANGA MAU	0	0		21	6	29	3	1	33	1
12	KAYAN HULU	NANGA TEBIDAH	0	0		12	2	17	1	0	-	0

13	SERAWAI	SERAWAI	0	0		15	4	27	1	0	-	0
14	AMBALAU	KEMANGAI	0	0		9	1	11	1	0	-	0
	JUMLAH		1	1	100	488	143	29	111	26	23	19

Sumber: Sekretariat UKS Kabupaten Sintang

Jika dilihat dan dikaji berdasarkan teori dan cara menilai organisasi pelayanan publik oleh bahwa salah satunya adalah dilihat dari Efektivitas yang berkaitan dengan berfungsinya pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan secara rasionalitas, nilai, tujuan maka dapat dikatakan bahwa frekuensi serta intensitas pembinaan dari Tim pembina UKS Kabupaten sangat jauh dari apa yang diharapkan. Ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Sintang terdiri dari banyak Kabupaten tetapi hanya beberapa Kabupaten saja yang dibina, bahkan dari banyaknya sekolah tetapi yang dijangkau oleh pembinaan hanya beberapa sekolah saja. Ini membuktikan kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang secara efektivitas sangatlah lemah dan kurang.

2. Responsibilitas Tim pembina UKS Kabupaten Sintang

Responsibilitas disini akan diukur dari kemampuan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang untuk lebih tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan kebutuhan siswa disekolah-sekolah. Responsibilitas dimasukkan sebagai sebagai salah satu indikator karena secara langsung kemampuan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang dalam menjalankan misi dan tujuan yang diembannya, khususnya sebagai pembina serta kordinator di dalam mengajarkan pola hidup sehat kepada anak-anak di sekolah-sekolah.

Dalam operasionalisasinya, responsivitas Tim pembina UKS Kabupaten Sintang tercermin dari cepat tidaknya dalam melaksanakan program UKS yang diembankan kepada Tim yang dimaksud.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu salah seorang guru mengatakan bahwa :

“Menjelang setiap ada kegiatan Tim pembina UKS cukup sering datang kesekolah kami, dan mereka selalu bertanya apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam melaksanakan program UKS disekolah, dan ketika banyak hal yang kami sampaikan dengan harapan dapat diberikan jalan keluarnya tetapi nyatanya pendapat kami sebagai guru hanya ditampung saja tanpa direspon apa-apa”.

Hal yang sama juga diperoleh dari staf guru di SD 1 Sintang Ibu Erna mengatakan bahwa :

“Kalau masalah kunjungan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang cukup baik, terutama sering memanggil dan mengumpulkan para guru untuk diberi arahan, tetapi mereka itu minim solusi dan cenderung kurang tanggap dengan situasi yang ada di sekolah-sekolah. Karna yang paling tahu keadaan sekolah yaitu guru dan siswa tetapi pendapat dari kami sepertinya tidak terlalu ditanggapi, buktinya sampai sekarang tidak diberi solusi, contoh nyata adalah tong sampah yang sudah beberapa kali di ajukan dan diusulkan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas nampak sekali bahwa tingkat Responsibilitas Tim pembina UKS Kabupaten Sintang sangat lah rendah dalam menanggapi kebutuhan serta keluhan yang dialami oleh siswa dan guru di sekolah.

Seharusnya dalam memberikan pelayanan serta pembinaan kepada siswa disekolah sebaiknya Tim pembina UKS memiliki daya tanggap dan respon supaya hubungan kerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, karena adanya sifat saling membantu dan menghargai dan menaruh kepercayaan antara satu dengan yang lain.

Hal ini menjadi sangat penting karena untuk dapat mewujudkan sekolah yang sehat harus dimulai dari hubungan timbal balik dan kerjasama yang solid dari Tim pembina UKS Kabupaten Sintang dengan para siswa dan guru salah satunya dibuktikan dengan saling memberikan respon antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah daftar pengajuan dari sekolah yang dibina pada tahun 2013

Tabel. 4.2
Daftar Pengajuan Keperluan Sekolah yang di Bina pada Tahun 2013

N0	Nama Sekolah	Usulan	Realisasi
1.	TK. Suluh Harapan	<ul style="list-style-type: none"> - Tong Sampah - Foster dinding - Cat dinding - Skat/pembatas ruangan 	<p>ada</p> <p>tidak</p> <p>tidak</p> <p>tidak</p>
2.	SMA 2 Sintang	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan WC - Perbaikan Ventilasi - Washtafel - Tong sampah 	<p>tidak</p> <p>ada</p> <p>tidak</p> <p>ada</p>
3.	SD 1 Sintang	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan parit limah - Tong sampah - Penambahan WC - Renovasi Lantai 	<p>tidak</p> <p>tidak</p> <p>tidak</p> <p>tidak</p>
4.	SMPN 1 Sei. Tebelian	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan WC - Perbaikan Kantin - Tong sampah - Tong Air - Gerobak - Penambahan pot bunga - Bibit tanaman obat-obatan 	<p>ada</p> <p>ada</p> <p>tidak</p> <p>tidak</p> <p>tidak</p> <p>ada</p> <p>tidak</p>

Sumber: Bagian Kesra Kab.Sintang 2013

Merujuk dari tabel di atas jelas nampak bahwa dari sekian banyak usulan dari setiap sekolah yang dibina, tetapi hanya beberapa bagian saja yang berhasil

direspons atau dikabulkan oleh Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang. Dari data tersebut di atas adalah fakta bahwa daya tanggap dan Responsibilitas dari Tim pembina UKS masih sangat rendah. Kondisi ini dipertegas oleh Ketua Tim pembina UKS Kabupaten Sintang Pak Isworo, yang mengatakan:

Memang kami akui sebab ini adalah fakta dilapangan bahwa walaupun tim pembina UKS telah di bentuk berdasarkan SK Bupati Sintang, tetapi para anggota tim Pembina UKS yang terdiri dari banyak instansi yang ada di dalamnya sangat lemah komitmen dan respon dalam mengimplementasikan program UKS, contoh nyata adalah ketika ada rapat yang membahas masalah UKS yang datang hanya itu dan itu saja, apalagi dalam hal pembinaan kelapangan /kesekolah-sekolah, padahal berkali-kali selaku ketua saya menghimbau supaya mereka menjalankan tanggungjawabnya tetapi tidak direspons dengan baik, sehingga hal ini menjadi problem dari tahun ketahun dan perlu dicari jalan keluarnya.”

Pernyataan ini kembali dipertegas oleh alah satu anggota tim pembina UKS Kabupaten Sintang Bapak Purwono yang menandakan:

”Lemahnya motivasi serta kurangnya kesadaran dari para anggota tim pembina UKS Kabupaten Sintang menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya tim pembina UKS dalam mengimplemntasikan program UKS kesekolah-sekolah, sebab keteladanan harus dimulai dari atas bukan dari bawah”

Pernyataan di atas dipertegas dari data kehadiran absensi rapat yang membahas masalah UKS di ruang rapat setda Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2013, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Kehadiran Absensi Rapat yang membahas masalah Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Sintang

NO	WAKTU RAPAT	JUMLAH YANG HADIR	MEMBAHAS UKS
1	10 Januari 2013	10 orang	Penjaringan sekolah
	2 Pebruari 2013	8 Orang	Persiapan LSS
	25 Maert 2013	12 orang	Pemantapan persiapan
	5 April 2014	9 orang	LSS
	6 Juni 2013	11 orang	Pembahasan UKS

	22 Juli 2013	12 orang	Kunjungan ke sekolah
	4 Agustus 2013	10 orang	Pembinaan kesekolah
	3 September 2013	17 orang	Pembahasan UKS
	2 Nopember 2013	18 orang	Evaluasi UKS
	10 Nopember 2013	9 orang	Laporan UKS

Sumber : Bagian Kesra Kab. Sintang 2013

Bila di ukur dengan indikator Resposibilitas, seperti yang disampaikan oleh Dwiyanto (1995) maka Tim pembina UKS Kabupaten sintang daya resfon dan tanggungjawabnya terhadap tugas yang telah diberikan Pmerintah sangat masih rendah. Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan informan di atas, nampak bahwa resposibilitas para tim pembina UKS di dalam menjalankan tugasnya kurang optimal dan masih jauh dari apa yang diharapkan.

3. Produktivitas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang

Salah satu cara untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau kelembagaan adalah dengan melihat jumlah atau besar produktivitas yang dihasilkan. Dalam hal ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari Tim pembina UKS Kabupaten Sintang di dalam melakukan pembinaan dan mensosialisasikan pola hidup sehat kepada sekolah-sekolah.

Salah satu program UKS yang sangat terkenal adalah Lomba Sekolah Sehat (LSS) baik tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional. Demi turut menyukseskan program tersebut Tim pembina UKS Kabupaten Sintang selalu turut ambil bagian dalam Lomba Sekolah Sehat.

Sebelum menentukan sekolah yang berhasil mengikuti lomba terlebih dahulu Tim pembina UKS Kabupaten Sintang melakukan penjarangan kesekolah-

sekolah yang ada di Kabupaten Sintang, tetapi tidak semua sekolah diperlakukan sama dan adil sebab sekolah-sekolah yang jauh letaknya tidak mendapat kunjungan apalagi diseleksi untuk mengikuti lomba. Hal ini menjadi salah satu fenomena dan modus kerja yang tidak baik bagi Tim pembina UKS Kabupaten yang seharusnya menerapkan asas keadilan dan sama rata kesetiap sekolah yang ada di Kabupaten Sintang. Hasil wawancara penulis dengan kepala Dinas Kesehatan menjelaskan:

Dalam penerapannya dilapangan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang tidak dapat mengikutsertakan semua sekolah di tiap Kecamatan oleh karena jarak dan letak sekolah-sekolah sangat jauh, dan jika hal ini dipaksakan ini sangat mustahil mengingat keterbatasan dana yang dimiliki. Karena itu konsekuensi logisnya adalah hasil dari pembinaan dari UKS sudah pasti tidak maksimal secara hasil.

Tahun 2013 ada empat sekolah yang berhasil dijangkau yaitu TK Suluh Harapan, SD 1 Sintang, SMPN 1 Sungai Tebelian, dan SMA 2 Sintang. Tetapi ketika mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Provinsi hanya TK Suluh harapan saja yang berhasil menjadi juara pertama. Ini membuktikan bahwa belum maksimalnya pembinaan UKS yang dilakukan oleh Tim pembina UKS Kabupaten Sintang, ditambah lagi semangat sekolah sehat hanya sebatas ketika mengikuti lomba dan setelah selesai lomba anak-anak di sekolah cenderung mengabaikan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan sekolah. Hasil wawancara penulis dengan ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan sekolah Kabupaten Sintang, bapak Isworo, menjelaskan:

“Dilihat dari upaya dan kerja yang telah dilakukan oleh tim pembina UKS Kabupaten Sintang di dalam mengajarkan pola hidup sehat dapat lah dikatakan bahwa hasilnya masih belum optimal, memang salah satu untuk mengukur keberhasilan pembina UKS di sekolah adalah dapat dilihat dari hasil Lomba sekolah sehat baik tingkat Kabupaten maupun tingkat nasional, tahun ini saja hanya satu sekolah yang berhasil masuk nominasi dan menjadi juara 1 yaitu TK Suluh Harapan. tetapi sesungguhnya yang

kita kejar bukan hanya juara tetapi perubahan sikap dan perilaku hidup sehat itulah yang menjadi tujuan utama “

Hal senada juga dipertegas oleh Bapak Mimpor yang mengatakan:

Terelepas dari hasil yang telah dicapai oleh tim pembina UKS Kabupaten Sintang, dengan jujur saya katakan hasil dan produktivitas sangat rendah, karena ini dapat dilihat dari kehidupan praktis di sekolah, setelah lomba Sekolah selesai, kehidupan amburadur dan seenaknya kembali ditunjukkan siswa yang kurang sadar mengenai bagaimana pola hidup sehat “.

Berikut adalah data produktivitas atau hasil yang telah dicapai Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang:

Tabel 4.4
Data Produktivitas atau Hasil yang telah dicapai Tahun 2013

NO	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH YANG MENGIKUTI LOMBA TINGKAT PROVINSI	JUMLAH SEKOLAH YANG MENGIKUTI LOMBA TINGKAT NASIONAL	JUARA TK..PROVINSI	JUARA TK..NASIONAL
1	TAHUN 2010	3 Sekolah	0	0	0
	TAHUN 2011	4 Sekolah	0	1 sekolah	0
	TAHUN 2012	4 Sekolah	1 sekolah	2 sekolah	0
	TAHUN 2013	3 Sekolah	1 sekolah	1 sekolah	0
	TAHUN 2014	4 Sekolah	0	1 sekolah	0

Sumber : Bagian Sekretariat UKS Kab. Sintang 2013

Jika dikaji dengan Pendapat Mardiasmo (2001) seperti yang disampaikan pada kajian teori jelas bahwa salah satu indikator dalam menilai kinerja adalah indikator output yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu

kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan, yang dilakukan dengan cara membandingkan perencanaan awal dengan hasil yang dicapai.

Jika dilihat dari indikator benefit, yaitu menggambarkan manfaat yang diperoleh dari pembinaan juga dapat dikatakan sangat masih rendah dalam hal pengaruh (*impact*) Maka jelaslah bahwa tim pembina UKS Kabupaten Sintang dapat dikatakan bahwa produktivitas dari kinerja Tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah sangatlah rendah dan belum optimal di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tim yang telah dipercayakan oleh Pemerintah untuk mengajarkan pola hidup sehat kepada siswa di sekolah-sekolah.

D. Faktor Pendukung dan faktor penghambat yang Mempengaruhi Kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang

Setelah dilihat kinerja Tim pembina UKS secara aktual sehari-hari yang pada kenyataannya rendah. Begitu pula bila dilihat dari kinerjanya Selanjutnya dapat pula kita lihat faktor-faktor apa yang menyebabkannya.

1. Faktor Pendukung

Dalam merealisasikan kinerja secara nyata dilapangan Tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang tentu ada hal-hal yang menjadi faktor pendukung secara positif, hal ini tentunya akan memberikan dampak secara nyata di dalam melaksanakan program UKS disekolah-sekolah. Berikut akan dijelaskan beberapa di antaranya adalah:

a. Kerjasama yang Solid

Mengingat Tim pembina UKS terdiri dari banyak instansi yang tergabung di dalamnya, maka sangat diperlukan kekompakan dan keseriusan dari anggota tim pembina UKS dalam melaksanakan program UKS di Kabupaten Sintang. Kalau melihat dari banyaknya instansi yang ada di dalam tim pembina UKS maka hal ini merupakan suatu aset yang potensial dan kekuatan di dalam mewujudkan program UKS yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat. Karena segala kendala dan halangan yang ada dapat ditanggung dan dicari solusi bersama misalnya berkaitan dengan pembinaan kesehatan di tangani oleh Dinas Kesehatan, berkaitan dengan bidang pendidikan ditangani oleh Dinas Pendidikan, dalam kaitannya dengan pentingnya penataan lingkungan didalam tim Pembina UKS ada Badan Lingkungan Hidup, selanjutnya berkaitan dengan segala kebersihan bisa ditangani oleh Dinas Kebersihan dan berkaitan dengan keagamaan ditangani oleh Kementerian Agama dan seterusnya.

Apabila semua instansi dapat berkerja dengan kompak dan sungguh-sungguh maka tim pembina UKS Kabupaten Sintang akan menjadi sukses di dalam menjalankan semua program yang ada.

b. Dukungan dari Pemerintah

Salah satu program Pemerintah Kabupaten Sintang adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, baik rohani maupun jasmani melalui beberapa agenda yang mendapat prioritas. Prioritas ini difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan kesehatan melalui pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, optimalisasi

angka kesehatan ibu dan anak, pengadaan obat, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan seperti kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Rujukan, revitalisasi puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan gizi buruk serta peningkatan mutu tenaga kesehatan, Pembinaan Lingkungan Sehat, termasuk di dalamnya adalah Lingkungan Sekolah.

Oleh karena itu mengingat UKS adalah program Pemerintah pusat maka Kabupaten Sintang sangat memberikan dukungan di dalam menjalankan program UKS di Kabupaten demi tercapainya pola hidup sehat disetiap sekolah yang ada di Kabupaten Sintang.

2. Faktor penghambat

Berikut adalah beberapa faktor penghambat di dalam tim pembina UKS melakukan tugas dan fungsinya:

a. Tidak Profesional.

Menurut Zauhar (1996:9), menyebutkan :

“Peningkatan kinerja individu dapat dilihat dari keterampilannya, kecakapan praktisnya, kompetensinya, pengetahuan dan informasinya, keleluasaan pengalamannya, sikap dan prilakunya, kebajikannya, kreativitasnya, moralitasnya dan lain-lain. Kinerja kelompok dilihat dari aspek kerjasamanya, keutuhannya, disiplinnya, loyalitasnya dan lain-lain”.

Hal senada juga disampaikan Robins (2001:273), bahwa :

“ Sejumlah faktor struktural menunjukkan suatu hubungan ke kinerja. Di antara faktor yang lebih menonjol adalah persepsi peran, norma, inekuitas status, ukuran kelompok, susunan demografinya, tugas kelompok, dan kekohesifan”.

Pengelompokan dalam pembagian tugas dalam bekerja melalui unit-unit kerja dalam organisasi didasarkan kepada spesialisasi yang seharusnya ditunjang serta didukung oleh tenaga profesional yang handal dan berkemampuan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dapat dilihat dari sikap serta perilaku pegawai apakah secara positif dan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi dengan baik.

Suatu organisasi agar dapat bekerja secara efisien maka setiap orang dari anggota dalam lingkungan organisasi itu harus mempunyai kecakapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya

Orang-orang yang bekerja dalam organisasi diharapkan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara profesional.

Seperti yang disampaikan Kartasmita (1997:10), bahwa :

“Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya, kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan, dan bertanggungjawab atas profesinya”.

Anggota tim yang profesional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai tim pembina UKS sangatlah dibutuhkan agar tercipta penyelenggaraan pembinaan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pelayanan yang prima kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Profesional bagi tim pembina UKS adalah merupakan kemampuan tim untuk bisa bekerja dengan baik dibutuhkan kesungguhan dalam bekerja agar mampu melaksanakannya dengan baik dan bertanggungjawab. Berdasarkan temuan penulis dilapangan dapatlah dikatakan bahwa ada anggota Tim Pembina UKS yang tidak berkerja secara profesional, hal ini menjadi salah satu kendala di dalam Tim berkerja dengan baik.

b. Ketidakseriusan Anggota Tim .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari dibutuhkan kesungguhan dalam melakukan pekerjaan agar hasil pekerjaan sesuai dengan harapan yang menjadi tujuan dari terselenggaranya pegejaran tentang kesehatan di sekolah. Sesuai dengan pengamatan penulis pada Tim pembina UKS dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari masih terlihat adanya kesan kurang sungguh-sungguh dalam menghadapi pekerjaan.

Keadaan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Kesehatan Pak Benny enos, sebagai berikut :

“Saya sebenarnya bukan tidak mau aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan UKS, tetapi saya melihat bahwa program UKS dari tahun ketahun hanya itu dan itu saja, dan seringkali hanya merupakan keharusan untuk mengikuti program Pemerintah sedangkan sasaran dan tujuan tidak terlalu jelas. Dan andaikan saya mengikuti dan hadir itupun hanya untuk santai-santai dan memenuhi keinginan pimpinan yang memberi perintah kepada saya”.

Keadaan di atas menunjukkan kesungguhan Anggota Tim pembina UKS dalam melakukan pekerjaan masih sangat rendah.

c. Ketidakjelasan Pembagian Tugas.

Struktur Organisasi adalah Sebagai bentuk cara di mana tugas dan tanggungjawab dialokasikan kepada individu, di mana individu tersebut dikelompokkan. Struktur Organisasi hendaknya selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan publik dan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang cepat”.

Uraian tugas adalah berisikan tentang apa dan bagaimana seseorang harus berbuat sesuai dengan porsinya yang telah ditentukan oleh atasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tetapi serngkali para pegawai terutama staf tidak berkerja berdasarkan uraian tugas, dan hal ini berakibat buruk pada kualitas dan hasil kinerja atau dengan kata lain produktivitas kinerja menjadi menurun akibat dari tumpang tindihnya wewenang yang di miliki oleh yang melakukan pekerjaan.

Berdasarkan data dan pengamatan penulis di lapangan. Terutama ketika mengikuti rapat mengenai UKS yang muncul dan datang bukan yang diundang melainkan staf yang tugasnya bukan sebagai pengambil keputusan melainkan hanya dijadikan perwakilan dan menampung serta mencatat, yang selanjutnya disampaikan ke pimpinan. Dengan kata lain mekanisme kerja yang dilakukan Tim pembina UKS seringkali tidak terstruktur sesuai aturan dalam organisasi, padahal sebenarnya struktur organisasi merupakan gambaran dari tanggungjawab atau wewenang di dalam berkerja. Seperti yang disampaikan Steers (1977:70), bahwa :

“Struktur menyatakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas”.

Hal senada juga disampaikan Robbins (1995:6), :

“Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti”.

Selanjutnya Fayol (dalam Robbins, 1994:29), menjelaskan beberapa hal prinsip dalam organisasi, yaitu :

1. Pembagian kerja. Spesialisasi menambah hasil kerja dengan cara membuat para pekerja lebih efisien.
2. Wewenang. Jika wewenang digunakan seseorang harus sama dengan tanggungjawabnya.
3. Disiplin. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, saling pengertian yang jelas antara manajer dan karyawan tentang peraturan serta penerapan hukuman yang adil bagi yang menyimpang.
4. Kesatuan komando. Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan.
5. Kesatuan arah. Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin seorang manajer dengan menggunakan sebuah rencana.
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu.
7. Remunerasi. Para pekerja harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan.
8. Sentralisasi. Apakah pengambilan keputusan itu disentralisasi atau didisentralisasi
9. Rantai Skalar. Garis wewenang dari manajemen puncak sampai ke tingkat yang paling rendah merupakan rantai skalar.
10. Tata tertib. Orang dan bahan harus ditempatkan pada tempat dan waktu yang tepat.
11. Keadilan. Para manajer harus selalu baik dan jujur terhadap bawahan.
12. Stabilitas masa kerja pegawai. Perputaran (turn over) pegawai yang tinggi adalah tidak efisien.
13. Inisiatif. Para pegawai yang diizinkan menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana akan berusaha keras.
14. *Esprit de Corps*. Mendorong team spirit akan membangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi.

Fenomena yang selalu mengutus bawahan sudah menjadi pola yang dilakukan ketika ada rapat guna pembahasan kegiatan UKS, hal ini bukan hanya dilakukan oleh instansi tertentu yang tergabung di dalam Tim pembina UKS melainkan hampir semua instansi berbuat seperti itu.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini dapat ditelusuri hasil wawancara dengan salah satu staf Lingkungan Hidup pak Sanito, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau berbicara mengenai mewakili saya adalah ujung tombaknya, bayangkan setiap kali ada kegiatan seperti rapat saya selalu di utus untuk datang mewakili pimpinan, satu sisi saya senang karena

mendapat kepercayaan tetapi dari sisi lain saya menjadi bingung karena hanya hadir tetapi tidak dapat memberikan keputusan sementara dalam rapat tersebut harus diambil keputusan seketika itu juga”.

Hal senada juga diperoleh berdasarkan wawancara dengan salah satu staf Dinas Kebersihan Kabupaten Sintang pak Pajri, menjelaskan sebagai berikut :

“Saya memang mendapat kepercayaan untuk mewakili kepala Dinas untuk menghadiri rapat tentang UKS, karena ada keterkaitan juga dengan tupoksi saya, tetapi jujur saya sering bingung ketika di tanya di dalam rapat mengenai kebijakan yang harus di ambil karena saya tidak tahu dan tidak berani berkomentar takut salah.”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut :

“Saya selaku pimpinan memang mengakui bahwa saya jarang sekali menghadiri rapat UKS karena selaku kepala Dinas sangat sibuk dan sering keluar . ada kalanya pekerjaan yang saya distribusikan tidak pada bidangnya, hal ini untuk mengantisipasi agar cepat selesai dan sesuai dengan waktu dan hasil yang dikehendaki atasan, karena selalu saja pada saat dibutuhkan tenaganya untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan tidak berada di tempat. ”.

Dari hasil wawancara Penulis dengan beberapa unsur yang tergabung di dalam Tim pembina UKS Kabupaten Sintang maka dapatlah di ketahui bahwa pembagian tugas dan pelimpahan wewenang masih merupakan hal yang menjadi penghambat di dalam mengimplementasi program UKS. Sebab tanpa kerjasama dan pelimpahan tugas yang baik dalam sebuah tim maka tidak mungkin dapat dihasilkan suatu kinerja yang berkualitas atau dengan kata lain seperti yang disampaikan oleh Kaswan (2013:62) menjelaskan bahwa: dalam sebuah tim memiliki beberapa gaya

yang semuanya harus diperankan dengan baik seperti: Kontributor, kolaborator, Komunikator dan *Chaleengers* (Penantang)

d. Lemahnya Koordinasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, suatu organisasi tidak terlepas dari perlu adanya koordinasi yang baik antar sub bagian atau antar bagian yang ada maupun antar lembaga yang sama level dan tingkatannya.

Dari berbagai pendapat pakar yang diuraikan dalam kerangka teori dapat disimpulkan bahwa perlu adanya keterpaduan tugas dan saling kerja sama dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi sehari-hari.

Adapun koordinasi yang ada pada Tim pembina UKS Kabupaten Sintang meliputi koordinasi vertikal, yaitu koordinasi dari atasan berupa koordinasi yang dilakukan oleh Bupati Sintang sebagai dukungan atas pelaksanaan tugas Tim pembina UKS Kabupaten Sintang kepada Tim pembina UKS Provinsi hampir tidak ada, bahkan Bupati hanya datang apabila ada kegiatan Lomba sekolah sehat dalam menyampaikan kata sambutan saja. Selanjutnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, Agama, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sintang kepada Kepala bagian Kesra Setda Kabupaten Sintang yang selanjutnya diteruskan kepada bidang yang merupakan bagian dari UKS.

Sedangkan koordinasi Horizontal berupa koordinasi antara Kepala Dinas yang ada di dalam Tim pembina UKS Kabupaten Sintang, kepada Sub Bagian dari Dinas yang bersangkutan. Berdasarkan pengamatan dan data yang penulis peroleh saat penelitian di lapangan koordinasi antara Kabag Kesra sebagai *leading sektor* dari pelaksanaan UKS dengan Dinas yang tergabung di dalam UKS sudah ada namun respon dari Dinas atau instansi yang tergabung di dalam UKS sangat rendah bahkan cenderung diabaikan, dan seolah-olah tidak mau tahu dengan kegiatan UKS, hal ini dibuktikan jarang nya kehadiran para kepala Dinas ketika di undang rapat di Ruang Setda dalam kaitannya membahas tentang kegiatan UKS.

Sedangkan koordinasi antara para kasubbag dalam melakukan tugas dan fungsinya sehari-hari juga ada, namun ada juga kasubbag yang masih merasa dibiarkan bekerja sendiri, padahal kerja yang dilakukannya tersebut perlu koordinasi dengan kasubbag lainnya, namun kasubbag lain tersebut kurang paham dan cenderung mengabaikan tanggung jawabnya, akibatnya koordinasi tidak berjalan dengan baik, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat menjadi tertunda, dengan demikian tentunya dibutuhkan apa yang harus dilakukan atasan. Dengan kata lain kebijaksanaan yang harus diambil oleh atasan. Hal tersebut bisa berlarut oleh karena pihak atasan tidak pernah mengadakan pertemuan seperti rapat koordinasi untuk menyatukan persepsi para bawahan agar bisa bekerja sesuai

dengan misi yang diemban sesuai pula dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Tim pembina UKS.

Hasil wawancara penulis berkaitan dengan lemahnya koordinasi dalam kaitannya dengan kegiatan UKS seperti yang disampaikan oleh Kepala sub Pendidikan Kesehatan yang membidangi UKS di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang ibu Imelda Safarisa, SP menjelaskan :

“Demi kelancaran pelaksanaan program UKS kami antar Kasubbag, saya selalu berusaha untuk saling koordinasi, bahkan saya selalu telpon dan berusaha menghubungi rekan-rekan yang tergabung di dalam tim UKS yang ada di Dinas atau instansi lain supaya proaktif didalam mengembangkan UKS, tetapi saya selalu memperoleh bermacam-macam alasan yang tidak logis sebagai bentuk lari dari tanggung jawab. namun demikian masih juga ada yang belum tanggap”.

Pendapat di atas dipertegas dari wawancara dengan salah satu staf di bagian Pendidikan dan Kesehatan Setda Kabupaten Sintang yang mengatakan:

“Saya melihat secara langsung bagaimana parahnya koordinasi yang ada di dalam Tim pembina UKS Kabupaten Sintang, seharusnya sebagai tim haruslah solid dan banyak berkomunikasi, bagaimana kita mau mengajarkan kepada siswa dan guru disekolah-sekolah tentang pola hidup sehat sementara para anggota tim pembina UKS sendiri tidak kompak di dalam merealisasikan program UKS”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kabag Kesra dengan hasilnya sebagai berikut :

“Saya sebagai Kepala bagian Kesra dan sekaligus leading sektor dan sekaligus sebagai ujung tombak dalam menjalankan program UKS Saya rasa koordinasi sudah saya laksanakan semampunya, namun respon dari teman-teman di instansi terkait sangat minim sekali, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya minat serta motivasi di dalam menjalankan tugas sebagai tim pembina UKS, padahal setiap Tim pembina UKS memperoleh honor dari kegiatan tersebut”.

Berdasarkan fakta di atas dan temuan berdasarkan hasil wawancara maka dapat dimengerti bahwa lemahnya koordinasi yang ada di dalam Tim Pembina UKS menjadi salah satu penyebab terhambatnya implementasi program UKS secara maksimal. seperti yang disampaikan oleh Budi Susilo, dalam Artikel Pengembangan SDM yang ditulis Pusdiklat PSDM 1 Oktober 2014, yang menjelaskan : bahwa koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kesuksesan koordinasi akan menjamin pencapaian tujuan organisasi lainnya. Kaswan (2013;49) menjelaskan:

koordinasi sangat berhasil apabila pihak-pihak yang terpengaruh oleh usulan perubahan bisa berkontribusi terhadap pembahasan perubahan-perubahan itu. Metode kerja dengan orang lain ini menciptakan kekayaan ide, memastikan kesadaran terhadap pandangan-pandangan yang berbeda mengenai konsekuensi tindakan , dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok. Koordinasi efektif mencegah duplikasi usaha dan membantu mempromosikan cita-cita bersama.

Artinya bahwa koordinasi yang efektif bisa dihasilkan hanya apabila ada kerjasama yang baik dan kompak di dalam sebuah tim atau kelompok demi mencapai tujuan bersama.

e. Finansial.

Kemajuan organisasi publik bukan hanya ditentukan oleh sumber daya manusia atau ketersediaan segala sarana maupun prasarana, tetapi juga faktor finansial atau keuangan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Dengan ketersediaannya anggaran maka akan memperlancar berjalannya suatu kegiatan, dalam suatu organisasi, selain faktor SDM dan sarana fisik

lainya, sebab dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Segala bentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau yang telah dirumuskan harus diikuti dengan dukungan anggaran yang cukup. Tim Pembina UKS setiap tahunnya memperoleh dukungan dana dari Pemerintah, tetapi dana tersebut tidaklah memadai jika dibandingkan beban kerja yang diberikan kepada tim pembina UKS Kabupaten Sintang. Terlebih jika dilihat dari Sintang yang jumlah Kecamatannya adalah 14 Kecamatan dan jika dilihat dari letak geografis sangatlah jauh dan sulit untuk ditempuh, maka sudah pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salah seorang anggota Tim Pembina UKS Kabupaten Sintang bapak Beni Enos yang mengatakan:

“Salah satu penyebab tidak meratanya pembinaan mengenai UKS kesekolah-sekolah adalah karena terbatasnya dana untuk membiayai perjalanan dan segala akomodasi yang akan pergi melakukan pembinaan ke kecamatan-kecamatan yang paling jauh. Dan kami secara khusus tidak mungkin mengeluarkan biaya sendiri, mengingat tugas itu adalah untuk kepentingan dinas. Menurut jika mau terjadi pemerataan dalam hal pembinaan dan sosialisasi UKS maka tidak ada lain jalan keluarnya selain sedia anggaran yang memadai”

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa faktor anggaran atau finansial berperan sekali dalam menunjang kegiatan dinas, dengan demikian aspek finansial dapat dikatakan sebagai faktor vital dalam keberlangsungan suatu organisasi. Hal senada juga disampaikan oleh Sanito, salah seorang Anggota Tim Pembina UKS, yang menyatakan bahwa:

“ Menurut saya pembinaan UKS akan berjalan dengan baik dan maksimal apabila adanya anggaran yang cukup. Selama ini kami seperti kerja bakti dan selalu mengikuti kegiatan sekalipun tidak ada biaya, tetapi jika kegiatan tersebut jaraknya jauh dan memakan biaya yang besar, maka sudah pasti saya tidak bisa karna tidak ada dana untuk berangkat. Selama ini pembinaan UKS selalu dilakukan di Kecamatan-kecamatan yang dekat, sebab jika pembinaan di lakukan di kecamatan yang jauh sudah pasti

banyak biaya. Jadi menurut saya faktor anggaran atau finansial memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas, sebab tanpa ditunjang oleh anggaran yang cukup, bagaimana kami dapat melaksanakan tugas ke lapangan.”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas jelas bahwa keuangan memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas suatu organisasi. Seperti yang disampaikan Wiharja Jian (2001:10) menjelaskan:

“uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahkan hampir segala sesuatu dalam dunia ini dinilai dengan uang. Uang merupakan prioritas utama. Kita harus membicarakan pandangan kita mengenai uang. Serahaknya manusia mendorong manusia korupsi dan berlaku tidak adil terhadap sesama,”

Dengan demikian tanpa anggaran dan dana yang cukup mustahil bagi suatu organisasi bisa bealan dengan baik. Begitu juga dengan pembinaan UKS, memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melakukan pembinaan kesekolah-sekolah.

E. Keterkaitan antara Variabel Tidak Profesional, Ketidakseriusan Anggota tim, Ketidakjelasan pembagian tugas, lemahnya koordinasi dan Finansial terhadap rendahnya Kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang

Setelah melakukan pembahasan secara satu persatu nampak bahwa keterkaitan antara berbagai variabel yang berpengaruh terhadap dapat di uraikan dibawah ini: Sebuah aktifitas dalam segala hal membutuhkan suatu keahlian yang sesuai dengan bidangnya dan mempunyai sebuah kompetensi standard dalam suatu bidang yang dikerjakan tersebut, apabila orang melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya maka suatu hal buruk akan menyimpannya,

karena sebuah pekerjaan memerlukan sebuah kompetensi ahli dalam bidang pekerjaan tersebut.

Sebuah Pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan disebut profesi. Profesi memerlukan seorang yang menjalankannya maka itu disebut professional, dalam artian sempit bisa disimpulkan seperti itu.

Sebuah professional tidak bisa tumbuh hanya dengan sebuah rangsangan dari seseorang atau sebuah saran yang diberikan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan, melainkan professional harus ditempuh dengan beberapa tahapan dan aksi praktik dalam sebuah pekerjaan.

Nur Khasanah (2013:79) menjelaskan ada beberapa syarat seseorang disebut Profesional:

Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

Apabila dikaitkan dengan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang maka dapat dikatakan bahwa Tidak Profesionalnya anggota tim yang tergabung di dalam Tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah akan sangat berpengaruh terhadap tingginya kinerja, karena kinerja yang baik dan berdaya guna hanya akan dihasilkan oleh individu yang memiliki sumber daya dan kecakapan yang handal dan menguasai bidangnya.

Kurang serius dan tidak fokusnya anggota tim didalam berkerja akan berdampak buruk pada keberlangsungan kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa anggota tim, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya anggota tim yang tidak sungguh di dalam berkerja akan mengakibatkan setiap kegiatan yang ada di dalam Tim pembina UKS menjadi tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu Elemen penting didalam sebuah tim adalah pembagian tugas. Pembagian tugas berkaitan dengan beban kerja serta tanggung jawab yang diberikan untuk dikerjakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Pembagian tugas yang tidak dijalankan dengan baik akan menurunkan kualitas dari pekerjaan yang dikerjakan.

Pembagian tugas yang dimaksud harus berdasarkan kompetensi, Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Setiap anggota bertanggungjawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggungjawab yang harus dipenuhinya.

Nur Khasanah (2013: 49-50) Kompetensi dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

-Core Competencies (Kompetesi Utama)

Kompetensi utama adalah sebuah kompetensi yang didefinisikan sebagai kemampuan internal yang sangat penting bagi perusahaan. Kompetensi ini adalah diharapkan dimiliki oleh semua individu dalam organisasi

-Threshold competencies

Adalah karakteristik pemegang pekerjaan sehingga bisa menjalankan pekerjaan secara efektif, tetapi tidak dapat digunakan seorang yang berkinerja tinggi, rata-rata, atau rendah. Misalnya penjual yang baik harus kemampuan yang memadai tentang produk yang mereka jual, tetapi pengetahuan ini tidak selalu cukup untuk memastikan performa penjualan mereka.

-Differentiating Competencies

Adalah karakteristik yang membedakan individu berkinerja superior dengan rata-rata. Misalnya individu yang bekerja di bidang desain memiliki Differentiating Competencies dalam mendesain yang membuatnya lebih unggul dari orang lain.

Dalam tim pembina UKS, berdasarkan wawancara yang penulis peroleh bahwa hal yang biasa terjadi ketika seseorang yang diundang rapat untuk memaparkan apa yang telah dikerjakan tetapi oleh yang bersangkutan diwakilkan, sehingga individu tersebut tidak menguasai bidangnya. Hal seperti ini menyebabkan kinerja akan menjadi tidak berkualitas.

Koordinasi adalah salah satu syarat mutlak didalam kerja sebuah tim, sebab koordinasi adalah jaminan bagi lancarnya suatu hubungan yang harmonis di dalam sebuah kerja tim (*team work*) apabila di dalam tim pembina UKS tidak terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik maka kerja sebuah tim akan sangat rendah. Terlebih di dalam tim pembina UKS terdiri banyak instansi yang didalamnya terdapat keanekaragaman gaya, pola pikir dan keinginan.

Faktor finansial atau keuangan adalah salah satu modal di dalam menjalankan usaha atau kegiatan. Tanpa keuangan yang memadai dan dana yang cukup sulit bagi organisasi mencapai sasaran yang diinginkannya. Begitu juga dengan tim pembina UKS, karena keterbatasan dana menyebabkan pembinaan dan sosialisasi mengenai program UKS menjadi rendah dan tidak berjalan dengan baik.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa berbagai faktor di atas menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya Kinerja tim pembinaan UKS Kabupaten Sintang di dalam menjalankan tugas dan misinya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebagai simpulan dalam pembahasan karya ilmiah ini menunjukkan bahwa yang seharusnya fungsi dan tugas dari Tim pembina UKS Kabupaten Sintang yang adalah sebagai pembina serta koordinator dari pelaksana program UKS di Kabupaten Kota tetapi kenyataan dilapangan fungsi itu tidak berjalan dengan baik oleh karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran baru yang bersifat terobosan dan progresif agar dapat memberikan solusi yang tuntas dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak memberikan implikasi buruk yang lebih luas terhadap eksistensi penyelenggaraan program UKS kedepan baik pada saat ini dan juga pada masa mendatang supaya program UKS menjadi salah satu cara untuk menanamkan pola hidup sehat kepada anak didik di sekolah-sekolah.

Dari perspektif di atas, serta memperhatikan secara khusus pembahasan terhadap variabel dan indikator yang mempengaruhi berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Tim pembina UKS Kabupaten Sintang hingga saat ini belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator efektivitas, responsibilitas dan produktivitas. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas, dari seberapa besar kegiatan dan kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang telah sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai

pembina UKS di sekolah-sekolah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, siswa, dan para guru masih jauh yang diharapkan. Dimana selama ini fungsi tugas Tim pembina UKS Kabupaten Sintang hanya melakukan pembinaan cenderung bersifat rutinitas dan hasilnya tidak banyak memberikan pengaruh secara signifikan.

2. **Responsibilitas**, dilihat dari keberadaan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang yang belum maksimal bahkan daya respon nya terhadap segala fenomena dan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah terutama siswa sangat rendah.
3. **Produktivitas**, dilihat dari apa yang telah dibuat oleh Tim pembina UKS Kabupaten Sintang yang seharusnya bisa jauh lebih baik dari pada saat ini jika kinerjanya ditingkatkan. Untuk melihat produktivitas dapat dilihat dari hasil Lomba Sekolah Sehat yang hanya mampu menghasilkan satu juara yaitu TK Suluh Harapan pada tahun 2013. Rendahnya kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

Tingkat profesionalisme di dalam berkerja sangat rendah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Tim pembina UKS Kabupaten Sintang, kurangnya keseriusan di dalam berkerja, ini disebabkan lemahnya motivasi di dalam individu, sehingga menyebabkan produktivitas kerja jauh dari apa yang diharapkan.

Kejelasan dalam pembagian tugas, yaitu sering tumpang tindihnya pekerjaan seharusnya pekerjaan yang merupakan tugas dari orang tertentu, tetapi

oleh karena tidak dapat hadir mengharuskan perwakilan saja yang datang, hal seperti ini membuat hasil tidak maksimal dalam pengambilan keputusan.

Tingkat koordinasi yang lemah, mengingat bahwa Tim pembina UKS terdiri dari banyak instansi maka koordinasi menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan. Tetapi di dalam Tim pembina UKS Kabupaten Sintang koordinasi sangatlah buruk.

B. SARAN

Keberadaan UKS sebagai pembina dan koordinator di dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih memiliki posisi strategis di dalam memberikan pengaruh serta dampak yang signifikan bagi masyarakat, guru dan siswa di sekolah. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran guna peningkatan kinerja Tim pembina UKS kedepan supaya menjadi baik di antaranya:

Perlunya adanya kesadaran yang mendalam daripada pimpinan yaitu Bupati dan Kepala Dinas yang membawahi UKS untuk menjadikan UKS sebagai ujung tombak perubahan di sekolah demi meningkatnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan sekolah.

Sebaiknya di dalam Anggota Tim pembina UKS sering diadakan evaluasi hasil kinerja untuk melihat sejauh mana mutu dan respon masyarakat, guru dan siswa apakah sudah mengalami kemajuan yang berarti atau masih berjalan ditempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi. (1996). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bernardin, Jhon, and Russel, E. A. Joyce.(1998), *Human Resource Management , An Experiental Aproach*.
- Bryant, C & White, LG. (1982). *Managing Development in The third World*, West View Press, Mc, diterjemahkan oleh Rustyanto, L .1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Jakarta : LP3ES
- Darwin, Muhadjir. (1994). *Teori Organisasi Publik*, Hand Out Perkuliahan Matrikulasi, Yogyakarta : MAP UGM.
- Dwiyanto, Agus, (1999), *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM, Yogyakarta.
- (1995), *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Makalah dalam Seminar Sehari : Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- (2001), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, Yogyakarta.
- Dunn, William, N, (1994), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.
- (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice Hall Inc, Englewood Clivffs,
- (1998). *Public Policy Analysis: An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,

Dye, R, Thomas, (1972), *Understanding Public Policy*, Prentice hall, Inc, Englewood Cliffs, New jersey.

Effendi, Sofian, (2001), *Analisis Kebijakan Publik*, Modul Kuliah MAP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

----- (2002), *Materi Kuliah Evaluasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, MAP-UGM, Yogyakarta.

Echols, John M, and Shadily, Hassan, (1992), *An English-Indonesian Dictionary* (Kamus Inggris Indonesia), PT Gramedia, Jakarta.

Esman, Milton, J, (1989). *The Element of Institution Building*, Ithaca: Cornell University Press.

Islamy, Irfan M, (1994), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Jackson, J.H, Morgan, CP, dan Paolillo, J, (1978). *Organization Theory, A Macro Perspective for management*, Prentice-Hall, U.S.A.

Jones, Gareth R, (1991), *Organizational Theory: Text and Cases Addition Wesley Publishing Company*, A & M University, Texas.

Jenkins, W.I., (1978). *Policy Analysis*, Martin Robertson, Oxford,

Kartasasmita, Ginandjar. (1997). *"Membangun Sumber Daya Sosial Profesional"*, Bappenas, Jakarta.

Kaswan, (2013), *Leadership and Team Working*, ALFABETA Bandung.

Kumorotomo, Wahyudi, dan Subando, Margono, Agus, (1998), *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Keban, T. Yeremias, (1995), *Kinerja Organisasi Publik*, Bahan seminar sehari dalam rangka purna tugas Drs. Sedyono, Fisipol- UGM, Yogyakarta.

----- (1995), *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Yogyakarta, MAP-UGM

Mardiasmo, (2001). *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Makalah Seminar Otonomi Daerah, oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Batam.

Moeleong, Lexy, J, (1995), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

-----, (2000), *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

- Nawawi, Hadari, (1992), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Press, Yogyakarta.
- (1990), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
- Nasir, Moh. (1988), *Methodes Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Khasanah , Nur (2013). *Etika Profesi dan Profesional Bekerja* Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK
- Prawirosentono, Suyadi,(1992), *Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, BPFE, Yogyakarta.
- Robbins, P. Stephen. (1994). *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta : Arcan (Terjemahan).
- , 2001, *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta : Prenhallindo (terjemahan).
- Simamora, Henry, (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, SKPN, Yogyakarta.
- Steers, R. M. (1977). *Organization Effectiveness, A Behavioral View*, Good Year Publishing Company, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. 1980. Jakarta :Erlangga.
- Suradinata, Ermaya. (1995). *Psikologi Kepegawaian dan Peranan Pimpinan dalam Motivasi Kerja* .Bandung : Ramadan.Press.
- Sughanda, Dann.(1992). *Kapita Selekta Administrasi dan Pendapat Para Pakar*, Jakarta : Arcan.
- Stoener, James. A. F. (1986). *Manajemen Jilid 2*, Jakarta : Erlangga.
- Stoener, James. A. F. and Freeman, Edward. R.(1992). *Manajemen*, Edisi keempat, Jilid 1, Jakarta : Intermedia.
- Sugiyono, (1998), *Metode Penelitian Administratif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto, Cahyono (2005). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan*
- Suradinata, Ermaya, (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Ramadhan Bandung.
- Susilo, Budi, (2014). *Artikel Pengembangan Sumber Daya Manusia*
- Verma Vijay K, (1997), *Managing the Projec team* Management Institute.
- Wahab, Solichin Abdul, (1997), *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, samodra, dkk, (1994), Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yin, Robert K., (1997), Studi Kasus : Desain dan Metode, Diterjemahkan oleh M. Djauzi Muzakir, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Zauhar, Soesilo. (1996). *Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi*, Jakarta : Bumi Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 45 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU N0.23 Th. 1992 tentang penyelenggaraan Kesehatan Sekolah

SKB 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diperbaharui pada tahun 2003.

Keputusan Bupati Sintang Nomor: 441/14/KEP-KESRA/2013, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sintang di dibentuk.

JURNAL

Brian, F Manansal (2014) Kinerja Pegawai di Sekretariat DPRD Kota Belitung. Jurnal Politico Vol.1 No 4. h. 245

Dyah Ayu Lestari Windi Astuti (2006)Penciptaan Sistem Penilaian Kinerja yang Efektif dengan Assessment Centre Jurnal Manajemen, Vol. 6, No. 1.

Sri Trisnarningsih (2011) Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Dosen Akutansi. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja sumber daya manusia di DPRD Provinsi Jawa Tengah . JRR Vol.1 No 1Januari h.13-30

TESIS

Alizar, (2002), “ Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Dalam Era Otonomi.

Permana, J.H , (2002), “ Tesis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakerta”

Yusuf, Edy, (2003), Kinerja Lembaga Legislatif (Studi Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Deli Serdang.

INTERNET

Abudin Nata ,<http://kel2-profesionalismekerja.blogspot.com>



HASIL WAWANCARA
 KINERJA TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH DALAM MENGMPLEMENTASIKAN PROGRAM
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI KABUPATEN SINTANG

Responden :

1. Teodetty, S.Sos (Anggota tim pembina UKS Kab. Sintang)
2. Lutfi (Tokoh Masyarakat)
3. Abui (Tokoh Masyarakat)
4. Kurniadi, SP, (Guru SMPN 1 Pandan
5. Herman (Siswa SMA 2 Sintang

Pertanyaan:

1. Efektivitas

- a. Sejauh mana efektivitas dari kinerja tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah ?

“Didalam Tim pembian UKS Kabupaten Sintang sebenarnya sudah memiliki tugas dan Fungsi masing-masing tetapi rendahnya minat serta motivasi dari anggota tim menyebabkan kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan kesekolah-sekolah, hal ini diperparah lagi oleh malasnya anggota tim dalam mengikuti rapat, dan sering terjadi lempar tanggung jawab di dalam anggota tim, hal ini terjadi dari tahun ketahun. Akibatnya pengajaran tentang kesehatan sekolah tidak dapat ditransfer ke siswa dengan baik.”

- b. Bagaimana kontribusi tim pembina UKS dalam mengajarkan pola hidup sehat di sekolah

Menurut pendapat saya pembinaan yang telah dihasilkan oleh Tim pembina UKS Kabupaten Sintang belum mampu memberikan dampak secara nyata bagi para siswa di sekolah, sebab siswa disekolah hanya tahu sebatas pengetahuan saja tetapi ketika sampai dirumah mereka tidak meningat dan mempraktekkan, ditambah lagi pembinaan yang dilakukan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang hanya sebentar saja dan hanya sebatas ketika sekolah yang bersangkutan terpilih untuk menjadi perwakilan lomba sekolah sehat, sehingga hal ini tidak memiliki dampak jangka panjang. menjawab.

c. Bagaimana kinerja Tim pembina UKS di lapangan..?

Menurut hemat saya terlepas dari berbagai prestasi yang telah diperoleh Tim pembina UKS Kabupaten Sintang tetap saja efektivitas dari pembinaan di lapangan tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya kesadaran para siswa disekolah yang seenaknya membuang sampah-sampah sembarangan dan masih banyak siswa yang suka merokok, fenomena ini dapat dijadikan indikator bahwa prilaku hidup sehat di sekolah belum sepenuhnya diterima oleh siswa.

“

d. Apakah tim pembina UKS aktif melakukan pembinaan kesekolah..?

Menurut saya dalam melakukan pembinaan di sekolah-sekolah kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang jauh dari apa yang dikatakan maksimal, sebab ketika turun kelapangan untuk melakukan pembinaan yang datang hanya beberapa orang saja itu pun hanya melihat-lihat dan memberikan arahan tanpa memberikan sosialisasi yang real. Sehingga kegiatan tersebut hanya seperti memenuhi tugas semata tanpa ada sasaran atau gol yang jelas. Ditambah lagi minimnya bantuan serta sarana persarana penunjang yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang dibina.”

e. Apakah program UKS disekolah sudah efektif..?

Menurut pendapat saya berdasarkan apa yang saya lihat, program UKS hanya menjadi seperti penting ketika ada perlombaan sekolah sehat, sebab yang motivasi utama adalah mengejar juara, dan pada waktu itulah tim pembina UKS datang mengarahkan berbagai hal apa dan bagaimana yang harus di buat oleh guru dan murid untuk persiapan lomba sekolah sehat. Sedangkan ketika tidak ada lomba maka sama sekali tidak ada pembinaan dan kunjungan kesekolah kami yang berkaitan dengan UKS

HASIL WAWANCARA
 KINERJA TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH DALAM MENGMPLEMENTASIKAN PROGRAM
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI KABUPATEN SINTANG

Responden :

1. Jhon segapur (Guru)
2. Erna (Tokoh Masyarakat)
3. Isworo (Ketua tim pembina UKS)
4. Mimpor (Anggota Tim pembina UKS)
5. Purwono (Anggota Tim pembina UKS)

Pertanyaan:

1. **Responsibilitas**

a. Se jauh mana tim pembina UKS merespon setiap masukan...

Menjelang setiap ada kegiatan Tim pembina UKS cukup sering datang kesekolah kami, dan mereka selalu bertanya apa-apa saja yang menjadi kendala di dalam melaksanakan program UKS disekolah, dan ketika banyak hal yang kami sampaikan dengan harapan dapat diberikan jalan keluarnya tetapi nyatanya pendapat kami sebagai guru hanya ditampung saja tanpa direspon apa-apa”.

b. Apakah kunjungan Tim pembina UKS sudah maksimal

“Kalau masalah kunjungan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang cukup baik, terutama sering memanggil dan mengumpulkan para guru untuk diberi arahan, tetapi mereka itu minim solusi dan cenderung kurang tanggap dengan situasi yang ada di sekolah-sekolah. Karna yang paling tahu keadaan sekolah yaitu guru dan siswa tetapi pendapat dari kami sepertinya tidak terlalu ditanggapi, buktinya sampai sekarang tidak diberi solusi, contoh nyata adalah tong sampah yang sudah beberapa kali di ajukan dan diusulkan”.

c. Se jauh mana komitmen Tim pembina UKS dalam berkerja

Memang kami akui sebab ini adalah fakta dilapangan bahwa walaupun tim pembina UKS telah di bentuk berdasarkan SK Bupati Sintang, tetapi para anggota tim Pembina UKS yang terdiri dari banyak instansi yang ada di dalamnya sangat lemah komitmen dan respon dalam mengimplementasikan program UKS, contoh nyata adalah ketika ada rapat yang membahas masalah UKS yang datang hanya itu dan itu saja, apalagi dalam hal pembinaan kelapangan /kesekolah-sekolah, padahal berkali-kali selaku ketua saya menghimbau supaya mereka menjalankan tanggungjawabnya tetapi tidak direspon dengan baik, sehingga hal ini menjadi problem dari tahun ketahun dan perlu dicari jalan keluarnya.

d. Apa kendala utama di dalam kerjasama tim pembina UKS

Lemahnya motivasi serta kurangnya kesadaran dari para anggota tim pembina UKS Kabupaten Sintang menjadi salah satu faktor penyebab kurang maksimalnya tim pembina UKS dalam mengimplemntasikan program UKS kesekolah-sekolah, sebab keteladanan harus dimulai dari atas bukan dari bawah”



HASIL WAWANCARA
 KINERJA TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI KABUPATEN SINTANG

Responden :

1. Isworo, S.Sos (Ketua Tim Pembina UKS)
2. Mimpor (Anggota Tim Pembina UKS)
3. Dr. Markus (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sintang)

Pertanyaan:

1. Produktivitas

a. Apakah program UKS sudah berhasil dengan baik...?

Dilihat dari upaya dan kerja yang telah dilakukan oleh tim pembina UKS Kabupaten Sintang di dalam mengajarkan pola hidup sehat dapat lah dikatakan bahwa hasilnya masih belum optimal, memang salah satu untuk mengukur keberhasilan pembina UKS di sekolah adalah dapat dilihat dari hasil Lomba sekolah sehat baik tingkat Kabupaten maupun tingkat nasional, tahun ini saja hanya satu sekolah yang berhasil masuk nominasi dan menjadi juara 1 TK Suluh Harapan tetapi sesungguhnya yang kita kejar bukan hanya juara tetapi perubahan sikap dan prilaku hidup sehat itulah yang menjadi tujuan utama.

b. Apakah pencapaian program UKS sudah maksimal...?

Terlepas dari hasil yang telah dicapai oleh tim pembina UKS Kabupaten Sintang, dengan jujur saya katakan hasil dan produktivitas sangat rendah, karena ini dapat dilihat dari kehidupan praktis di sekolah, setelah lomba Sekolah selesai, kehidupan amburadur dan seenaknnya kembali ditunjukkan siswa yang kurang sadar mengenai bagaimana pola hidupn sehat.

c. Apakah kinerja Tim pembina UKS Kabupaten Sintang sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan...?

Dalam penerapannya dilapangan Tim pembina UKS Kabupaten Sintang tidak dapat mengikutsertakan semua sekolah di tiap Kecamatan oleh karena jarak dan letak sekolah-ekolah sangat jauh, dan jika hal ini dipaksakan ini sangat mustahil mengingat keterbatasan dana yang dimiliki. Karena itu konsekuensi logisnya adalah hasil dari pembinaan dari UKS sudah pasti tidak maksimal secara hasil

HASIL WAWANCARA
 KINERJA TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI KABUPATEN SINTANG

Responden :

1. Benny Enos, S.Ikom (Anggota tim pembina UKS)
2. Sanito (Anggota Tim Pembina UKS)
3. Dr. Markus (Kepala Dinas Kesehatan)
4. Imelda Safarisa, S.Sos (Kasubag Pendikes)
5. Teodetty, S.Sos (Anggota Tim pembina UKS)
6. Agus Akhmaddin, SE.MM (Kabag Kesra)

Faktor pendukung dan Penghambat

1. Apakah kendala yang bapak hadapi sebagai anggota tim pembina UKS...?

Saya sebenarnya bukan tidak mau aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan UKS, tetapi saya melihat bahwa program UKS dari tahun ketahun hanya itu dan itu saja, dan seringkali hanya merupakan keharusan untuk mengikuti program Pemerintah sedangkan sasaran dan tujuan tidak terlalu jelas. Dan andaikan saya mengikuti dan hadir itupun hanya untuk santai-santai dan memenuhi keinginan pimpinan yang memberi perintah kepada saya.

2. Apakah bapak aktif mengikuti segala hal yang berkaitan dengan UKS...?

Kalau berbicara mengenai mewakili saya adalah ujung tombaknya, bayangkan setiap kali ada kegiatan seperti rapat saya selalu di utus untuk datang mewakili pimpinan, satu sisi saya senang karena mendapat kepercayaan tetapi dari sisi lain saya menjadi bingung karena hanya hadir tetapi tidak dapat memberikan keputusan sementara dalam rapat tersebut harus diambil keputusan seketika itu juga”.

3. Sebagai kepala Dinas Kesehatan apakah bapak cukup aktif berkaitan dengan program UKS

Saya selaku pimpinan memang mengakui bahwa saya jarang sekali menghadiri rapat UKS karena selaku kepala Dinas sangat sibuk dan

sering keluar . ada kalanya pekerjaan yang saya distribusikan tidak pada bidangnya, hal ini untuk mengantisipasi agar cepat selesai dan sesuai dengan waktu dan hasil yang dikehendaki atasan, karena selalu saja pada saat dibutuhkan tenaganya untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan tidak berada di tempat. ”.

4. Apakah hal yang menjadi masalah utama di dalam tim pembina UKS

“Demi kelancaran pelaksanaan program UKS sebagai Kasubbag, saya selalu berusaha untuk saling koordinasi, bahkan saya selalu telpon dan berusaha menghubungi rekan-rekan yang tergabung di dalam tim UKS yang ada di Dinas atau instansi lain supaya proaktif didalam mengembangkan UKS, tetapi saya selalu memperoleh bermacam-macam alasan yang tidak logis sebagai bentuk lari dari tanggung jawab. namun demikian masih juga ada yang belum tanggap

5. Bagaimana pendapat anda mengenai koordinasi di antara anggota tim pembina UKS...?

Saya melihat secara langsung bagaimana parahnya koordinasi yang ada di dalam Tim pembina UKS Kabupaten Sintang, seharusnya sebagai tim haruslah solid dan banyak berkomunikasi, bagaimana kita mau mengajarkan kepada siswa dan guru disekolah-sekolah tentang pola hidup sehat sementara para anggota tim pembina UKS sendiri tidak kompak di dalam merealisasikan program UKS.

6. Sebagai Kabag Kesra apa permasalahan yang bapak lihat dan rasakan di dalam pelaksanaan program UKS...?

Saya sebagai Kepala bagian Kesra dan sekaligus leading sektor dan sekaligus sebagai ujung tombak dalam menjalankan program UKS Saya rasa koordinasi udah saya laksanakan semampunya, namun respon dari teman-teman di instansi terkait sangat minim sekali, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya minat serta motivasi di dalam menjalankan tugas sebagai tim pembina UKS, padahal setiap Tim pembina UKS memperoleh honor dari kegiatan tersebut\

FOTO/DOKUMENTASI

ANAK-ANAK YANG MENJADI DOKTER KECIL DALAM UKS DI
SEKOLAH SDN 7 SINTANG



PENULIS MENGHADIRI RAPAT DAN MELIHAT SECARA LANGSUNG
MENGENAI PERTEMUAN PARA TIM PEMBINA UKS KABUPATEN
SINTANG DENGAN PARA DEWAN GURUDAN SISWA DI SDN 5
SINTANG



**BUPATI SINTANG DATANG KESEKOLAH-SEKOLAH UNTUK MELIHAT
PERSIAPAN MENGENAI UKS DI KABUPATEN SINTANG**



**RAPAT BERSAMA SELURUH TIM PEMBINA UKS KABUPATEN
SINTANG DENGAN BEBERAPA KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN
SINTANG**



BUPATI DAN SELURUH UNDANGAN DAN TIM PEMBINA UKS KABUPATEN DAN PROVINSI MENGHADIRI ACARA PENILAIAN LOMBA SEKOLAH SEHAT (LSS) KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014



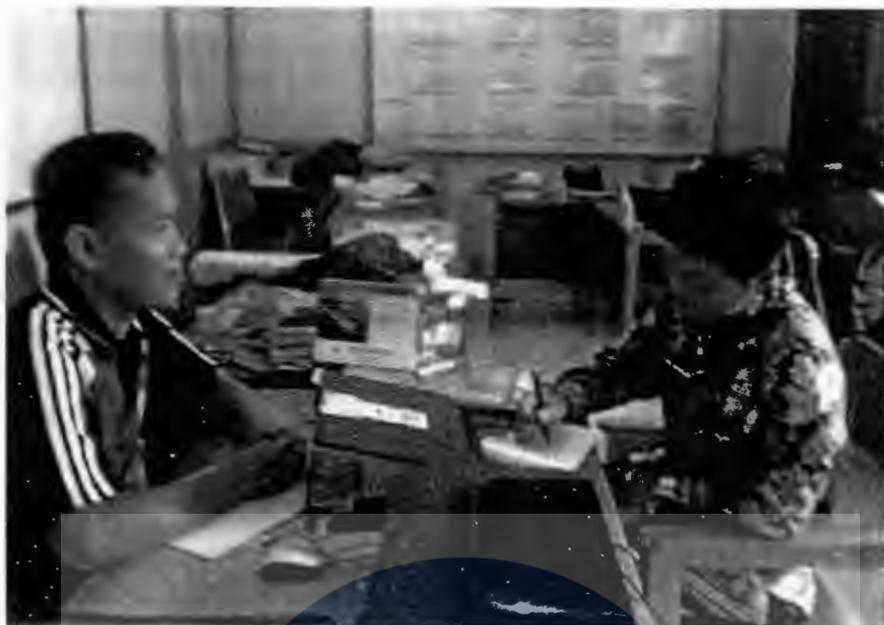
PARA DEWAN GURU SEDANG BERDISKUSI DENGAN MASYARAKAT MENGENAI MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM-PROGRAM UKS



PARA SISWA SEDANG MENDENGARKAN CERAMAH MENGENAI UKS



SUASANA TIM PEMBINA UKS SEDANG MEMBERIKAN PENGARAHAN MENGENAI APA ITU UKS



WAWANCARA PENULIS DENGAN SALAH SATU ANGGOTA TIM PEMBINA UKS KABUPATEN SINTANG, PAK MIMPOR



PENULIS BERFOTO BERSAMA DENGAN TIM PEMBINA UKS KABUPATEN SINTANG DAN TIM PEMBINA UKS PROVINSI KALIMANTAN BARAT



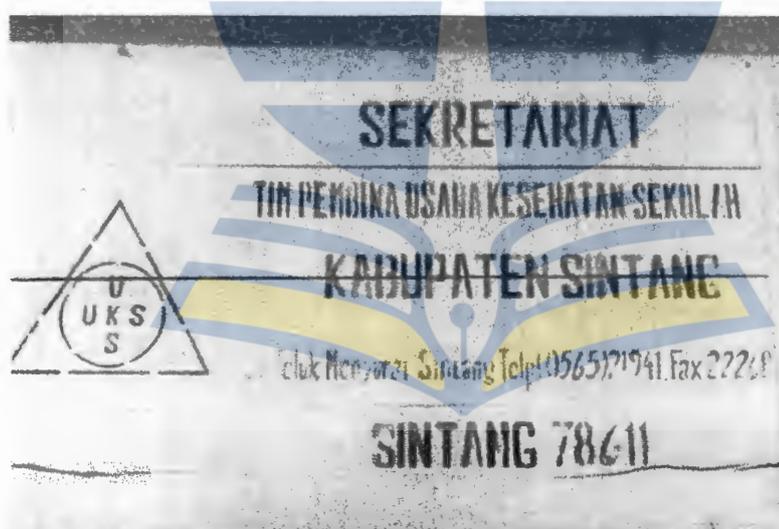
PENULIS SEDANG MELAKUKAN WAWANCARA DENGAN KETUA TIM PEMBINA UKS KABUPATEN SINTANG, PAK ISWORO, S.Sos



PLANG/OGO DARI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG



GAMBAR DARI SAMPING KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG



GAMBAR SEKRETARIAT TIM PEMBINA UKS KABUPATEN SINTANG



KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG DILIHAT DARI DEPAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pemulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021. 741 5588

BIODATA

NAMA : BANAN
NIM : 018556453
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Suran 4 Mei 1977
Registrasi Perdana :2012.2

Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD di SDN Nanga Seran Pada tahun 1991
2. Lulus SMP di SMPS Imanuel Sintang Tahun 1994
3. Lulus SMA di SMAN 3 Sintang Pada Tahun 1997
4. Lulus S-1 di STTK Sintang Pada Tahun 2002

Riwayat Pekerjaan:

1. Tahun 2002 s.d 2010 sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Teologi Sintang
2. Tahun 2010 Sampai Sekarang sebagai Staf Kasubag agama di bagian Kesra Setda Kab. Sintang

Alamat Tetap : Jalan Sintang- Pontianak Km. 13 Dusun Nenak Desa Balai Agung
Kecamatan Sungai Tebelian

No Telp : 081257943828
e-mail : banan. Sintang@gmail.com

Sintang, April 2015

BANAN
NIM: 081556453